

**PANDANGAN M. UMER CHAPRA TENTANG UPAYA  
MENEKAN INFLASI PADA TINGKAT SANGAT RENDAH  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Disusun guna Memenuhi sebagian persyaratan mencapai  
derajat Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

**Jurusan Ekonomi Islam (EI)**



Oleh:

**ONNY KUSUMA MARHANDIKA KUNCORO**

**092411139**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Onny Kusuma Marhardika Kuncoro

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Onny Kusuma Marhandika Kuncoro  
Nomor Induk : 092411139  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : **PANDANGAN M. UMER CHAPRA  
TENTANG UPAYA MENEKAN INFLASI  
PADA TINGKAT SANGAT RENDAH  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I,

Semarang, Juni 2015  
Pembimbing II,

**Dr. Ali Murtadho, M.Ag**  
**NIP. 19710830 199803 1003**

**H. Dede Rodin, Lc, M.Ag**  
**NIP. 19720416 200112 1002**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Onny Kusuma Marhardika Kuncoro  
NIM : 092411139  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul : **PANDANGAN M. UMER CHAPRA TENTANG  
UPAYA MENEKAN INFLASI PADA TINGKAT  
SANGAT RENDAH PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**..... Juni 2015**

Selanjutnya dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana  
Strata I tahun akademik 2014/2015

**Ketua Sidang,**

Semarang, Juni 2015  
**Sekretaris Sidang,**

**Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag**  
**NIP. 19590413 198703 2 001**

**Drs. H. Wahab Zaenuri MM**  
**NIP. 19690908 200003 1 001**

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Muhammad Saifullah, M.Ag**  
**NIP. 19700321 199603 1 003**

**Nur Fatoni, M.Ag.**  
**NIP. 19730811 200003 1 004**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Ali Murtadho, M.Ag**  
**NIP. 19710830 199803 1003**

**H. Dede Rodin, Lc, M.Ag**  
**NIP. 19720416 200112 1002**

## MOTO

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ... (الأنعام: ١٥٢)

Artinya: Dan berikanlah ukuran yang penuh dan timbangan dengan adil. (QS. Al An'aam : 152).\*

---

\*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Jakarta, 1986, h. 278.



## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- ❖ Bapak dan Ibuku yang tercinta yang memberi motivasi dan semangat dalam hidupku. Ridlamu adalah semangat hidup ku
- ❖ Mertuaku yang telah memberi motivasi selama ini
- ❖ Istriku tercinta yang telah memberi semangat dan menemaniku dalam suka dan duka sehingga tersusun skripsi ini.
- ❖ Calon anakku tercinta dan terkasih yang selalu kutunggu. Kehadiranmu membawaku ke dalam bahagia yang tak terkira
- ❖ Kakakku yang telah memberi semangat dan dorongan selama menyusun skripsi.
- ❖ Adikku tersayang dan seluruh keluarga, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- ❖ Teman-temanku yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama dalam canda dan tawa yang senasib seperjuangan.

**Penulis**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku

Semarang, 5 Mei 2015

**ONNY KUSUMA MARHARDIKA KUNCORO**  
**NIM: 092411139**

## ABSTRAK

Inflasi suatu keadaan yang bisa dialami oleh setiap negara yang menganut sistem ekonomi Kapitalis maupun sistem ekonomi Sosialis. Suatu sistem ekonomi kemungkinan memiliki kebijakan tersendiri, termasuk kebijakan dalam menekan inflasi. Ekonomi konvensional mempunyai cara dalam menekan inflasi, demikian pula ekonomi Islam mempunyai cara, sistem, dan strategi tersendiri dalam menekan inflasi. Secara umum inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, melemahkan semangat menabung, produksi barang menjadi turun, dan daya beli masyarakat makin melemah. Sehubungan dengan keterangan tersebut, sebagai perumusan masalah yaitu bagaimana pendapat M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Data primer adalah sejumlah karya tulis M. Umer Chapra, antara lain: *Towards a Just Monetary System*; *Islam dan Pembangunan Ekonomi*; *Islam dan Tantangan Ekonomi*; *Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi dokumentasi yang telah ada. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi yaitu harus ada stabilitas harga, dan strategi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Chapra: “Alternatif kebijaksanaan yang paling baik dan sesuai dengan norma keadilan sosio-ekonomi yang ditekankan oleh syari'ah adalah stabilitas harga. Menurut Chapra, strategi untuk menekan inflasi yaitu *pertama*, perbaikan moral (yang dikejar bukan hanya dimensi material tapi juga spiritual). *Kedua*, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. *Ketiga*, penghapusan riba. Menurut Chapra, inflasi mempunyai pengertian bahwa uang tidak dapat digunakan sebagai nilai tukar yang adil dan jujur. Ini menjadikan uang sebagai alat pembayaran yang tidak adil bagi penangguhan pembayaran dan penyimpanan nilai yang tidak dapat dipercaya. Uang dapat membuat sebagian orang menjadi tidak jujur kepada orang lain, bahkan meskipun tanpa disadari, dengan diam-diam merusak daya beli aset moneter.

Kata Kunci: Umer Chapra, Inflasi, Ekonomi, Islam

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“PANDANGAN M. UMER CHAPRA TENTANG UPAYA MENEKAN INFLASI PADA TINGKAT SANGAT RENDAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
3. Bapak H. Nur Fatoni, M.Ag selaku ketua jurusan Ekonomi Islam dan Bapak H. Ahmad Furqon, LC., MA selaku wakil ketua jurusan Ekonomi Islam
4. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak H.Dede Rodin, Lc, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak pimpinan perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
7. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14

### BAB II : INFLASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Inflasi .....	16
B. Penyebab Inflasi .....	18
C. Jenis-jenis Inflasi .....	24
D. Dampak dari Inflasi .....	29
E. Kebijakan-kebijakan Mengatasi Inflasi .....	33

### BAB III : PENDAPAT M. UMER CHAPRA TENTANG UPAYA MENEKAN INFLASI

A. Biografi M. Umer Chapra, dan Karyanya .....	42
B. Corak Pemikiran M. Umer Chapra .....	47

C. Pendapat M. Umer Chapra tentang Upaya Menekan Inflasi .	50
1. Dampak Inflasi.....	50
2. Inflasi menyebabkan perlunya kontrol harga dan subsidi	54
3. Kebijakan Moneter dan Fiskal.....	56
4. Merubah Sistem Perbankan.....	63
5. Upaya Menekan Inflasi .....	70

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT M. UMER CHAPRA TENTANG  
UPAYA MENEKAN INFLASI .....74**

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran-saran .....	94
C. Penutup .....	94

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Inflasi suatu keadaan yang bisa dialami oleh setiap negara yang menganut sistem ekonomi Kapitalis maupun sistem ekonomi Sosialis.<sup>1</sup> Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem-sistem ekonomi kapitalis dan sosialis; dan dalam beberapa hal merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut.<sup>2</sup> Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas ideologi yang memberikan landasan dan tujuannya, di satu pihak, dan prinsip-prinsipnya, di lain pihak.<sup>3</sup>

Sistem ekonomi adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Terdapat banyak faktor yang membentuk suatu sistem ekonomi, seperti ideologi, nilai-nilai yang dianut, kebudayaan, sistem politik, keadaan alam, sejarah, dan lain-lain. Pada umumnya, sistem ekonomi juga didasarkan pada pemikiran, konsep, atau teori-teori ekonomi

---

<sup>1</sup> Prinsip dasar sistem ekonomi sosialisme adalah sebagai berikut: Kepemilikan harta dikuasai oleh negara, rantai ekonomi produksi, distribusi, perdagangan dan industri menjadi monopoli negara atau masyarakat keseluruhan. Individu tidak diberi peluang untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi. Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Setiap individu akan memperoleh barang kebutuhan menurut keperluan masing-masing. Untuk mencapai suatu tatanan ekonomi yang ketat diberlakukan disiplin politik yang tegas dan keras. Negara mengambil alih semua aktivitas ekonomi dan kebebasan ekonomi dihapuskan sama sekali. Lihat Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001, h. 82.

<sup>2</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 10

<sup>3</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 5.

tertentu yang diyakini kebenarannya. Menurut Gregory and Stuart, elemen kunci dari suatu sistem ekonomi adalah: (1) hak kepemilikan, (2) mekanisme provisi informasi dan koordinasi dari keputusan-keputusan, (3) metode pengambilan keputusan, dan (4) sistem insentif bagi perilaku ekonomi. Suatu sistem ekonomi kemungkinan memberikan tekanan pada jenis hak milik tertentu, namun secara umum dapat dikategorikan menjadi hak milik individu, hak milik sosial, dan hak milik negara.<sup>4</sup>

Suatu sistem ekonomi kemungkinan memiliki kebijakan tersendiri, termasuk kebijakan dalam menekan inflasi. Ekonomi konvensional mempunyai cara dalam menekan inflasi, demikian pula ekonomi Islam mempunyai cara, sistem, dan strategi tersendiri dalam menekan inflasi. Seperti diketahui bahwa inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makroekonomi agregat: pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga berperan dalam mempengaruhi mobilisasi dana lewat lembaga keuangan formal.<sup>5</sup>

Menurut Adiwarman Karim, secara umum inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya

---

<sup>4</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 74

<sup>5</sup> Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis adalah sebagai berikut: Kebebasan memiliki harta secara perorangan: Tiap individu bebas menggunakan sumber-sumber ekonominya menurut apa yang dikehendakinya. Serta diberi kebebasan penuh untuk menikmati manfaat yang diperoleh dari hasil produksi dan distribusi barangnya. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas: Selagi tidak melanggar norma-norma masyarakat tiap individu bebas mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaannya. Tiap individu bebas mengoptimalkan semua potensi ekonominya baik fisik, mental dan sumber daya lainnya menurut keinginannya. Ketimpangan ekonomi : Pada sistem kapitalis modal memegang peranan yang strategis. Pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki modal relatif cukup banyak akan menikmati peluang usaha yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki modal hanya memperoleh kesempatan usaha yang sedikit sehingga akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin ...*, Jilid 1, h. 2.



penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas.<sup>6</sup> Menurut Sadono Sukirno, inflasi yaitu sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.<sup>7</sup> Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga, aset dan sebagainya). Biasanya diekspresikan sebagai persentase perubahan angka indeks. Tingkat harga yang melambung sampai 100% atau lebih dalam setahun (hiperinflasi), menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, sehingga masyarakat cenderung menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain, seperti real estate atau emas, yang biasanya bertahan nilainya di masa-masa inflasi. Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan.

Di dalam kenyataannya, inflasi tidak bisa diprediksikan, berarti orang-orang seringkali dikagetkan dengan kenaikan harga. Hal ini mengurangi efisiensi ekonomi karena orang akan mengambil risiko yang lebih sedikit untuk meminimalkan peluang kerugian akibat kejutan harga. Semakin cepat kenaikan inflasi, semakin sulit untuk memprediksikan inflasi di masa yang akan datang. Kebanyakan ekonom berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan efisien apabila inflasi rendah. Idealnya, kebijakan ekonomi makro harus bertujuan menstabilkan harga-harga. Sejumlah ekonom berpendapat bahwa tingkat inflasi yang rendah merupakan hal yang baik apabila itu terjadi akibat dari inovasi. Produk-produk baru yang diperkenalkan pada harga tinggi, akan jatuh dengan cepat karena persaingan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 135.

<sup>7</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 15.

<sup>8</sup> Nurul Huda, et al., *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 176.

Studi tentang penyebab inflasi di Indonesia telah banyak dilakukan, antara lain oleh Boorman (1975), Djiwandono (1980), Nasution (1983), Ahmad (1985), Ikhsan (1991). Namun pada umumnya dari studi di atas menunjukkan bahwa penyebab inflasi di Indonesia ada dua macam, yaitu inflasi yang diimpor dan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyebab inflasi lainnya menurut Sadono Sukirno adalah kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Adapun penyebab lain dari inflasi antara lain uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang yang beredar, sehingga permintaan akan barang mengalami kenaikan, maka dengan sendirinya produsen akan menaikkan harga barang dan apabila kondisi seperti ini dibiarkan maka akan terjadi inflasi.<sup>9</sup>

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain *self feeding inflation*
2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *marginal propensity to save*);
3. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah (naiknya *marginal propensity to consume*);

---

<sup>9</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar ...*, h. 15.

4. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) seperti; tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.<sup>10</sup>

Menurut Chapra, strategi untuk menekan inflasi yaitu *pertama*, perbaikan moral (yang dikejar bukan hanya dimensi material tapi juga spiritual). *Kedua*, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. *Ketiga*, penghapusan riba. Chapra mengatakan:

*“The most important element of the Islamic strategy for realising the Islamic goals is the integration of all supposedly mundane aspects of life with the spiritual to bring about a moral uplift of the human being and the society in which he lives. Without such a spiritual uplift, none of the goals can be realised and true human welfare would be difficult to attain”.*<sup>11</sup>

“Elemen paling penting dari strategi Islam untuk merealisasikan tujuan-tujuan Islam adalah bersatunya semua hal yang dianggap sebagai aspek kehidupan biasa dengan spirit untuk meningkatkan moral manusia dan masyarakat tempat dia hidup. Tanpa peningkatan spirit semacam itu, tidak akan ada satu tujuan pun yang dapat direalisasikan dan kesejahteraan manusia yang sesungguhnya jadi sulit diwujudkan”.<sup>12</sup>

Di Indonesia, pada saat penulis menyusun skripsi ini, inflasi ditunjukkan dengan naiknya barang-barang dan jasa. Harga beras yang terus menaik per kilo mencapai harga Rp. 12000,-, gas elpiji 12 kg naik Rp. 134000,-, harga minyak tanah, 1 liter Rp. 15000,-. Premium naik turun, harga cabe dan barang-barang lainnya merangkak naik, serta nilai tukar rupiah melemah. Kondisi ini makin melemahkan daya beli masyarakat, berbagai alternatif telah ditempuh para ekonom di Indonesia, namun keadaan masih belum membaik. Atas dasar itu, penelitian ini

---

<sup>10</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi ...*, h. 139.

<sup>11</sup> M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation, 1985, h. 45.

<sup>12</sup> M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. 16.

menjadi penting, terutama meneliti pemikiran salah seorang ekonom Islam yaitu M. Umer Chapra.

Adapun alasannya memilih tokoh dan pandangan M. Umer Chapra adalah karena ia merupakan salah seorang pakar ekonomi yang telah dapat mengetengahkan konsep moneter, sistem ekonomi Islam, konsep perbankan Islam, dan konsep riba secara lengkap, utuh dan mudah dipahami oleh berbagai pakar ekonomi Islam maupun ekonom konvensional.

Penulis melihat tokoh ini layak untuk diteliti karena paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator: pertama, integritas tokoh tersebut; kedua, karya-karyanya yang monumental; ketiga, kontribusi (jasa) atau pengaruhnya terlihat atau dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Berpijak pada pentingnya masalah di atas, maka penulis hendak mengangkat tema ini dengan judul: *Pandangan M. Umer Chapra tentang Upaya Menekan Inflasi pada Tingkat Sangat Rendah Perspektif Ekonomi Islam*

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana pendapat M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritik, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, dan setidaknya dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lain

2. Secara praktis, yaitu dapat dijadikan masukan bagi pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dalam hubungannya dengan upaya menekan inflasi terhadap kondisi ekonomi di Indonesia saat ini.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sepanjang pengetahuan peneliti belum ditemukan penelitian yang obyek bahasannya sama persis dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu hanya memiliki kesamaan dalam mengambil tokohnya yaitu Umer Chapra. Skripsi yang dimaksud antara lain:

Skripsi yang berjudul: “*Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra Tentang Riba*” disusun oleh Siti Saifiyatun Nasikhah (NIM: 052411185). Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini mengungkapkan, konsep riba Umer Chapra ini lebih ditekankan pada apa yang sesungguhnya dituntut dibalik pelarangan riba, yaitu untuk menegakkan sebuah sistem ekonomi di mana semua bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dihapuskan. Dengan kata lain, eksploitasi dan ketidakadilan merupakan esensi utama riba.<sup>13</sup>

Skripsi yang berjudul “*Hubungan Sistem Ekonomi Islam dengan Peranan Bank Sentral dalam Sistem Moneter Islam Menurut Muhamamd Umer Chapra*”, disusun oleh Nur Zaini (NIM: 082311059). Penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan bahwa karena bank sentral Islam akan menjadi kemudi dari sebuah sistem yang secara keseluruhan beda dan menantang, ia tidak dapat menjadi penonton pasif atau pengikut jinak teknik konvensional. Ia harus memberikan peran keteladanan dan aktif dalam keseluruhan proses islamisasi dan evolusi yang berkelanjutan sistem perbankan, paling tidak sampai sistem itu menjadi

---

<sup>13</sup> Siti Saifiyatun Nasikhah, “*Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra Tentang Riba*”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 31, t.d.

baik dan kuat. Persis seorang ibu, ia harus memahami, menyiapkan kelahiran, menyuapi, mendidik, dan membantu sistem perbankan Islam berkembang.<sup>14</sup>

Skripsi yang disusun oleh Isnu Taufiq (NIM: 2100007 MU) : *“Pemikiran Umer Chapra tentang Tiga Sumber Utama Ekspansi Moneter”*. Penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan bahwa dalam menciptakan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, M. Umer Chapra berorientasi pada moral. Moral dalam pengertian M.Chapra menyangkut tanggung jawab para pembuat kebijakan. Makna yang terkandung dari pemikirannya adalah agar para pembuat *policy* bertanggung jawab pada Tuhan bahwa setiap kebijakan akan diminta tanggung jawab oleh Tuhan. Di sini M.Chapra mengajak para ekonom dan pemerintah berpijak pada ajaran Islam. Dalam perspektif M.Umer Chapra bahwa untuk menciptakan iklim pertumbuhan moneter yang memadai dalam arti mencukupi, dan tidak "berlebihan", perlu memonitor secara hati-hati tiga sumber utama ekspansi moneter. Dua di antaranya adalah domestik. Pertama, membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral. Kedua, ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. Ketiga, bersifat eksternal, yaitu "menguangkan" surplus neraca pembayaran luar negeri.<sup>15</sup>

Skripsi yang disusun oleh Nur Inayah (NIM: 2101113) : *“Analisis Pendapat Umer Chapra tentang Tahapan-Tahapan Untuk Merubah Sistem Perbankan yang Islami”*. Penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan bahwa menurut M. Umer Chapra untuk mewujudkan sistem keuangan dan perbankan yang islami tidak perlu diwujudkan secara cepat melainkan harus menggunakan tahapan-

---

<sup>14</sup> Nur Zaini, “Hubungan Sistem Ekonomi Islam dengan Peranan Bank Sentral dalam Sistem Moneter Islam Menurut Muhamamd Umer Chapra”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2013, h. 28, t.d.

<sup>15</sup> Isnu Taufiq, “Pemikiran Umer Chapra tentang Tiga Sumber Utama Ekspansi Moneter”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2005, h. 43, t.d.

tahapan. Namun perwujudan perbankan islami tidak perlu menunggu terbentuknya masyarakat yang islami sebagaimana yang dicita-citakan.<sup>16</sup>

Menurut M. Umer Chapra ada beberapa tahapan untuk mewujudkan sistem perbankan islami yaitu dengan cara menghapus sistem bunga yang bersifat riba, pemberian kredit yang sama dan adil, perubahan sistem pajak, semua sektor ekonomi bergerak sama, perubahan seluruh sektor pemerintah, pengurangan bunga pinjaman terhadap sektor ekonomi yang vital, penerapan sistem bagi hasil, dan pembentukan lembaga-lembaga bantuan keuangan. Konsep M.Umer Chapra bila diaplikasikan dalam perkembangan ekonomi suatu negara maka akan terbentuk sektor ekonomi yang islami termasuk di dalamnya perbankan islami. Namun demikian untuk penerapannya tidak mudah, artinya di sana sini tentu akan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan.<sup>17</sup>

Penelitian M. Hatta dengan judul: “Telaah Singkat Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam” (*Jurnal Islamica*). Temuan penelitian menyatakan bahwa keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa serta otoritas moneter. Lebih dari itu, ada kecenderungan Inflasi dipandang sebagai permasalahan yang senantiasa akan terjadi. Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi. Setiap tahunnya otoritas moneter senantiasa menargetkan bahwa angka atau tingkat inflasi harus diturunkan menjadi satu digit atau inflasi moderat.

Dengan paradigma berpikir seperti itu, otoritas moneter dalam upaya menyelesaikan permasalahan inflasi cenderung “berkutut” pada bagaimana

---

<sup>16</sup> Nur Inayah, “Analisis Pendapat Umer Chapra tentang Tahapan-Tahapan Untuk Merubah Sistem Perbankan yang Islami”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2005, h. 28, t.d.

<sup>17</sup> *Ibid.*

menurunkan tingkat inflasi yang tinggi, bukan berpikir bagaimana agar inflasi tidak terjadi. Upaya otoritas moneter mengendalikan inflasi memang sangatlah beralasan. Terutama disebabkan dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari segi biaya, biaya yang harus ditanggung pemerintah dengan adanya inflasi sangatlah besar. Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga riil, pendapatan masyarakat akan terganggu, mendorong investasi yang keliru, dan menurunkan moral. Maka dari itu, mengatasi inflasi merupakan sasaran utama kebijakan moneter.<sup>18</sup>

Penelitian Ambok Pangiuk dengan judul: “Inflasi pada Fenomena Sosial Ekonomi Menurut Al-Maqrizi” (*Jurnal Kontekstualita*). Temuan penelitian bahwa Al-Maqrizi menyatakan, peristiwa inflasi pada fenomena sosial ekonomi adalah sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seantero dunia dahulu, kini, hingga masa mendatang. Inflasi menurutnya terjadi ketika harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang mengalami kelangkaan, dan konsumen karena sangat membutuhkannya, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang yang sama. Menurut Al-Maqrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Umumnya kedua mata uang itu dibentuk dinar dengan menggunakan bahan emas dan dirham dari bahan perak.

Dalam sejarah perkembangannya, Al-Maqrizi menguraikan bahwa bangsa Arab jahiliyyah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai

---

<sup>18</sup> M. Hatta, “Telaah Singkat Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam”, dalam *Jurnal Ekonomi Ideologis*, Vol. 3. No. 2. Maret 2009, h. 2-5.



bobot dua kali lebih berat di masa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengkaitkannya dengan hukum zakat harta. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan sedikitpun hingga tahun 18 H ketika khalifah Umar ibnu Al-Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut.<sup>19</sup>

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Jalal (NIM: 102411002): *"Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam Berbasis Nilai Material dan Spiritual"*. Penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan bahwa Menurut Mannan, prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan moneter bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Yang dimaksud nilai material adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia. Contoh, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal atau lebih dikenal sandang, pangan, papan. Yang dimaksud nilai spiritual adalah nilai yang berguna bagi rohani manusia. Nilai spiritual dibagi lagi menjadi nilai religi (agama), nilai estetika (keindahan, seni), nilai etika (moral) dan nilai logika (kebenaran).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ambok Pangiuk, "Inflasi pada Fenomena Sosial Ekonomi Menurut Al-Maqrizi, dalam *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 28. No. 1. Maret 2013, Jambi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, h. 164.

<sup>20</sup> Ahmad Jalal, "Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam Berbasis Nilai Material dan Spiritual", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2014, h. 43, t.d.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>21</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data-data tertulis seperti buku, kitab, majalah, jurnal dan lain-lain. Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penyelidikan kepustakaan (*library research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui perpustakaan.<sup>22</sup>

### 2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data utama yang menjadi objek penelitian, yang dalam hal ini yaitu sejumlah karya tulis M. Umer Chapra, antara lain: a. *Towards a Just Monetary System*; b. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*; c. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*.
- b. Data Sekunder adalah data pendukung yang mendukung data primer, yang dalam hal ini yaitu beberapa kitab atau buku yang relevan dengan judul tulisan ini, di antaranya: Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*; Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*; Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*; Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islami*; Zainul Arifin, *Dasar-Dasar*

---

<sup>21</sup> Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 5, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, h. 24.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, h. 42

*Manajemen Bank Syari'ah*; Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*; Achmad Ramzy Tadjoeidin, dkk, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*; Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*; Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*; Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi,<sup>23</sup> yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan karya-karya yang telah teruji kebenarannya. Karya-karya yang hendak dijadikan rujukan diseleksi berdasarkan kompetensi pengarang, dan tingkat kebaruan. Salah satu contohnya seperti karya Adiwarmanto Karim, MA. Mannan, Syafi'i Antonio, Ahmad Muhammad al-Assal, Syed Nawab Haider Naqvi, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Boediono, Sadono Sukirno dan Novirin.

### 4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data,<sup>24</sup> peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.<sup>25</sup> Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan

---

<sup>23</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta., 2008, h. 206.

<sup>24</sup> Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, h. 419.

<sup>25</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h. 134. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 14, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, h. 2. Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 14, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970, h. 269.

kondisi aktual di masa sekarang.<sup>26</sup> Maksudnya yaitu, deskriptif berarti menggambarkan, analisis berarti menguraikan. Jadi pengertian deskriptif analisis dalam penelitian ini yaitu menguraikan dan menggambarkan pendapat M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi, relevansi pendapat M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi dengan kondisi ekonomi di Indonesia saat ini. Penerapan metode deskriptif analisis adalah dengan cara menguraikan dan menggambarkan pendapat M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi, dihubungkan dengan kondisi ekonomi di Indonesia saat ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara ijmal namun holistik dengan memuat: pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua berisi inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yang meliputi pengertian inflasi, penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, dampak dari inflasi, kebijakan-kebijakan mengatasi inflasi (kebijakan fiskal, kebijakan moneter)..

Bab ketiga berisi pendapat M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi yang meliputi biografi M. Umer Chapra, dan karyanya, corak pemikiran M. Umer Chapra, pendapat M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi.

---

<sup>26</sup> Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 15., Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 30, Yogyakarta: Andi, 2001, h. 3. M. Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 89.

Bab keempat berisi analisis pendapat M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi yang meliputi analisis terhadap pendapat M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi, analisis relevansinya pendapat M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi dengan kondisi ekonomi di Indonesia saat ini.

Bab kelima berisi penutup, kesimpulan dan saran yang relevan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **INFLASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

#### **A. Pengertian Inflasi**

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai hampir di semua negara di dunia adalah inflasi. Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.<sup>1</sup>

Syarat adanya kecenderungan menaik yang terus menerus juga perlu diingat. Kenaikan harga-harga karena, misalnya, musiman, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai masalah atau “penyakit” ekonomi dan tidak memerlukan kebijaksanaan khusus untuk menanggulangnya.<sup>2</sup>

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makroekonomi agregat: pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga berperan dalam mempengaruhi mobilisasi dana lewat lembaga keuangan formal.<sup>3</sup> Menurut Adiwarman Karim, secara umum inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa

---

<sup>1</sup> Boediono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE, 2009, h. 155.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Nurul Huda, et al., *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 175.

selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas.<sup>4</sup>

Menurut Sadono Sukirno, inflasi yaitu sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.<sup>5</sup> Paul A. Samuelson mengatakan: *By inflation we mean a time of generally rising prices for goods and factors of production – rising prices for bread, cars, haircuts; rising wages, rents, etc. By deflation we mean a time when most prices and cost are falling.*<sup>6</sup> Jadi dalam perspektif Paul A. Samuelson, inflasi terjadi apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik; harga beras, bahan bakar, mobil naik; tingkat upah, harga tanah, sewa barang-barang modal juga naik. Sedangkan deflasi terjadi apabila harga-harga dan biaya-biaya secara umum turun.

Dengan demikian, inflasi adalah suatu proses atau peristiwa kenaikan tingkat harga umum.<sup>7</sup> Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga, aset dan sebagainya). Biasanya diekspresikan sebagai persentase perubahan angka indeks. Tingkat harga yang melambung sampai 100% atau lebih dalam setahun (hiperinflasi), menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, sehingga masyarakat cenderung menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain, seperti real estate atau emas, yang biasanya bertahan nilainya di masa-masa inflasi.

---

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 135.

<sup>5</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 15.

<sup>6</sup> Paul A. Samuelson, *Economics*, tenth edition, New York: McGraw-Hill Book Co, 1999, h. 154.

<sup>7</sup> Ace Partadiredja, *Pengantar Ekonomika*, Yogyakarta: BPFE, 2006, h. 132.

Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan. Di dalam kenyataannya, inflasi tidak bisa diprediksikan, berarti orang-orang seringkali dikagetkan dengan kenaikan harga. Hal ini mengurangi efisiensi ekonomi karena orang akan mengambil risiko yang lebih sedikit untuk meminimalkan peluang kerugian akibat kejutan harga. Semakin cepat kenaikan inflasi, semakin sulit untuk memprediksikan inflasi di masa yang akan datang.

Kebanyakan ekonom berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan efisien apabila inflasi rendah. Idealnya, kebijakan ekonomi makro harus bertujuan menstabilkan harga-harga. Sejumlah ekonom berpendapat bahwa tingkat inflasi yang rendah merupakan hal yang baik apabila itu terjadi akibat dari inovasi. Produk-produk baru yang diperkenalkan pada harga tinggi, akan jatuh dengan cepat karena persaingan.<sup>8</sup>

## **B. Penyebab Inflasi**

Studi tentang penyebab inflasi di Indonesia telah banyak dilakukan, antara lain oleh Boorman (1975), Djiwandono (1980), Nasution (1983), Ahmad (1985), Ikhsan (1991). Namun pada umumnya dari studi di atas menunjukkan bahwa penyebab inflasi di Indonesia ada dua macam, yaitu inflasi yang diimpor dan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyebab inflasi lainnya menurut Sadono Sukirno adalah kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang

---

<sup>8</sup> Nurul Huda, et al., *Ekonomi ...*, h. 176.



bertanggung jawab. Adapun penyebab lain dari inflasi antara lain uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang yang beredar, sehingga permintaan akan barang mengalami kenaikan, maka dengan sendirinya produsen akan menaikkan harga barang dan apabila kondisi seperti ini dibiarkan maka akan terjadi inflasi.<sup>9</sup>

Sampai batas tertentu ahli ekonomi masih bisa menganalisa sebab-sebab timbulnya inflasi khusus dari segi ekonomi; dan penentuan sebab-sebab "ekonomis obyektif" ini mungkin bukanlah tugas yang paling sukar. Dalam praktek, untuk mengetahui sebab-musabab timbulnya inflasi (terutama inflasi yang kronis atau yang telah berjalan lama) dan merumuskan, kemudian melaksanakan kebijaksanaan untuk menanggulangnya, adalah masalah yang sulit.

Biasanya ekonom harus melampaui batas-batas ilmu ekonomi dan memasuki bidang ilmu sosiologi dan ilmu politik. Masalah inflasi dalam arti yang lebih luas bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi masalah sosio-ekonomi-politis. Ilmu ekonomi membantu untuk mengidentifikasi sebab-sebab "obyektif" dari inflasi, misalnya saja karena pemerintah mencetak uang terlalu banyak.<sup>10</sup>

Kalau mempertanyakan mengapa pemerintah terus mencetak uang, meskipun mereka tahu bahwa tindakan tersebut mengakibatkan inflasi, maka seringkali jawabannya terletak di bidang sosial politik, misalnya karena pemerintah membutuhkan uang untuk operasi keamanan, atau karena adanya pertarungan politik di antara golongan-golongan politik di dalam negeri, atau karena pemerintah tak berdaya menghadapi tuntutan politik golongan-golongan masyarakat tertentu yang menghendaki "bagian" dari anggaran belanja negara yang lebih banyak dari apa yang bisa disediakan dari sumber-sumber penerimaan negara, atau karena desakan-desakan golongan masyarakat tertentu untuk memperoleh kredit murah sehingga

---

<sup>9</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar ...*, h. 15.

<sup>10</sup> Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5: Teori Moneter*, Yogyakarta: BPFE, 2009, h. 102-103.

jumlah kredit yang harus disediakan melebihi jumlah yang bisa menjamin kestabilan harga. Untuk bisa menghentikan pertambahan uang yang beredar yang berlebihan, dalam contoh-contoh ini, perlu dicapai penyelesaian politis lebih dahulu.<sup>11</sup>

Bentuk dari faktor-faktor sosial politis yang melandasi inflasi bisa berbagai ragam dan ditentukan oleh tata sosial-politis di masing-masing negara. Ahli ekonomi biasanya lebih suka memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor ekonomis-obyektif karena, selain merasa bahwa memang ini adalah bidang kompetensinya, faktor-faktor tersebut berlaku umum bagi semua negara dengan tata sosial-politik yang berbeda.

Teori-teori ekonomi mengenai inflasi lebih memusatkan pada dalil-dalil umum yang diharapkan berlaku secara umum, Ini tidak berarti bahwa ahli ekonomi seharusnya tidak perlu menyelidiki secara lebih mendalam faktor-faktor sosio-politik dari inflasi. Kalau ia ingin berguna, dalam arti bisa menentukan kebijaksanaan yang tepat untuk menanggulangi masalah inflasi di suatu negara, maka ia harus bisa mencapai "akar" dari permasalahan tersebut, yang belum tentu bersifat ekonomis-obyektif. Namun teori-teori ekonomi mengenai inflasi berguna sebagai titik tolak dari setiap analisa mengenai inflasi.<sup>12</sup>

Secara garis besar ada 3 kelompok teori mengenai inflasi, masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi dan masing-masing bukan teori inflasi yang lengkap yang mencakup semua aspek penting dari proses kenaikan harga ini. Untuk menerapkannya harus menentukan aspek-aspek mana yang dalam kenyataan penting di dalam proses inflasi di suatu negara, dan dengan demikian teori mana (atau kombinasi teori-teori mana) yang lebih cocok. Ketiga teori ini adalah: teori kuantitas, teori Keynes dan teori strukturalis:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 103.

<sup>12</sup> Boediono, *Ekonomi Makro ...*, h. 160

## 1. Teori kuantitas Uang

Teori kuantitas uang adalah teori yang paling tua mengenai inflasi, namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi pada saat ini terutama di negara sedang berkembang. Teori ini menyoroti peranan penambahan jumlah uang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga. Inti dari teori ini sebagai berikut:

- a. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan jumlah uang beredar. Dengan bertambahnya jumlah uang beredar secara terus menerus, masyarakat akan merasa kaya sehingga akan menaikkan konsumsinya, dan keadaan ini akan menaikkan harga.
- b. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa yang akan datang.<sup>13</sup>

Keadaan yang pertama adalah bila masyarakat belum mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Dalam hal ini, penambahan uang yang beredar akan diterima masyarakat untuk menambah kemampuan likuiditasnya sehingga kenaikan jumlah uang yang dimiliki masyarakat tidak sepenuhnya dibelanjakan barang dan jasa sehingga jika pemerintah menaikkan jumlah uang beredar sebesar 10% maka kenaikan ini hanya diimbangi oleh kenaikan harga barang-barang sebesar 1% saja. Kondisi ini tidak disadari masyarakat bahwa inflasi mulai timbul dan sedang berlangsung.

Keadaan yang kedua adalah dimana masyarakat mulai sadar akan adanya inflasi sehingga masyarakat mengharapkan kenaikan harga. Dengan demikian

---

<sup>13</sup> Endang Setyowati, et al., *Ekonomi Makro Pengantar*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2000, h. 157

jika ada penambahan jumlah uang beredar, maka penambahan uang tersebut akan digunakan untuk membeli barang dan jasa karena masyarakat merasa rugi untuk menyimpan uang dalam bentuk tunai. Kondisi ini sebenarnya malah menaikkan harga barang dan jasa namun masyarakat sudah mampu menghadapi inflasi ini karena inflasi sudah berjalan cukup lama dan mereka sudah mampu menghadapinya. Sehingga misalnya terjadi penambahan jumlah uang beredar sebesar 10% akan diimbangi dengan kenaikan harga sebesar 10% juga.

Keadaan yang ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah. Dalam keadaan ini, orang-orang sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Keengganan untuk memegang uang tunai dan keinginan untuk membelanjakan makin meluas di masyarakat. Orang-orang cenderung mengharapkan kenaikan harga yang makin tinggi dibandingkan dengan penambahan jumlah uang yang beredar.<sup>14</sup>

## 2. Teori Keynes

Menurut Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat menginginkan barang dan jasa yang lebih besar daripada yang mampu disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Proses inflasi menurut kelompok ini adalah proses perebutan bagian rejeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari apa yang mampu disediakan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan *inflationary gap* karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia.

Golongan-golongan tersebut bisa Pemerintah yang berusaha memperoleh lebih banyak barang dengan cara mencetak uang untuk mendanai kebutuhannya tersebut. Golongan yang lain bisa pengusaha-pengusaha yang ingin melakukan

---

<sup>14</sup> *Ibid*

investasi dengan mengambil kredit dari bank atau bisa juga serikat buruh yang meminta kenaikan upah melebihi produktivitasnya.<sup>15</sup>

### 3. Teori Strukturalis

Teori ini memberikan titik tekan pada ketegaran atau infleksibilitas dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Faktor-faktor strukturalis inilah yang menyebabkan perekonomian negara sedang berkembang berjalan sangat lambat dalam jangka panjang. Teori ini seringkali disebut teori inflasi jangka panjang. Menurut teori ini ada dua ketegaran utama yang dapat menimbulkan inflasi.

*Pertama*, ketidakelastisan penerimaan ekspor yaitu pertumbuhan nilai ekspor yang lamban dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama yaitu: jenis barang ekspor yang kurang responsif terhadap kenaikan harga dan nilai tukar barang ekspor yang semakin memburuk. Kedua hal inilah yang menyebabkan banyak negara berkembang. Mengambil keputusan menggalakkan industri substitusi impor, meskipun dengan biaya produksi yang lebih mahal dan kualitas yang lebih rendah. Dengan demikian, industri substitusi impor ini dapat mengakibatkan inflasi yang dikarenakan adanya ekonomi biaya tinggi.

*Kedua*, ketidakelastisan produksi bahan makanan di dalam negeri. Dalam hal ini laju pertumbuhan bahan makanan di dalam negeri tidak secepat laju pertumbuhan penduduk dan laju pendapatan perkapita. Akibat dari keadaan ini terjadi kenaikan harga barang-barang lainnya. Selanjutnya akan muncul tuntutan dari para karyawan untuk memperoleh kenaikan upah, dengan demikian akan menyebabkan kenaikan ongkos produksi, sehingga biaya produksi total

---

<sup>15</sup> Boediono, *Ekonomi Makro ...*, h. 163

meningkat. Hal ini menyebabkan pengusaha meningkatkan harga-harga produknya.<sup>16</sup>

### C. Jenis-jenis Inflasi

Terdapat berbagai macam jenis inflasi. Beberapa kelompok besar dari inflasi adalah:

1. *Policy induced*, disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya.
2. *Cost-push inflation*, disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi rendah.
3. *Demand-pull inflation*, disebabkan oleh permintaan agregat (keseluruhan) yang berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum.
4. *Inertial inflation*, cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan, dan tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak finansial dan upah, kenaikan inflasi akan terus berlanjut.<sup>17</sup>

Taqiuddin Ahmad bin Ali al-Maqrizi (1364-1441 M) sebagai salah seorang murid Ibnu Khaldun yang terkemuka membagi inflasi menjadi dua: inflasi akibat berkurangnya persediaan barang (*natural inflation*) dan inflasi akibat kesalahan manusia. Inflasi jenis pertama inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yaitu karena kekeringan atau peperangan. Sementara itu, inflasi jenis kedua menurut al-Maqrizi disebabkan oleh tiga hal. Pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Kedua, pajak berlebihan yang memberatkan petani. Ketiga,

---

<sup>16</sup> Endang Setyowati, et al., *Ekonomi...*, h. 158.

<sup>17</sup> Nurul Huda, et al., *Ekonomi ...*, h. 176.

jumlah fulus yang berlebihan atau yang oleh Milton Friedman disebut *inflation is just monetary phenomenon*.<sup>18</sup>

Al-Maqrizi memberikan perhatian khusus ketika membicarakan sebab yang ketiga. Dalam pengamatannya, ternyata kenaikan harga-harga (inflasi) yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah fulusnya. Misalnya, untuk sepatu yang sama diperlukan jumlah fulus yang lebih banyak. Akan tetapi, jarang sekali harga naik bila diukur dengan dinar (emas). Untuk itulah, al-Maqrizi menasihati agar jumlah fulus dibatasi hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk transaksi pecahan kecil.<sup>19</sup>

Menurut Paul A. Samuelson, seperti sebuah penyakit, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut;

1. *Moderate Inflation*: karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Umumnya disebut sebagai 'inflasi satu digit'. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil;
2. *Galloping Inflation*: inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi. Banyak perekonomian yang mengalami tingkat inflasi seperti ini tetap berhasil 'selamat' walaupun sistem harganya berlaku sangat buruk. Perekonomian seperti ini cenderung

---

<sup>18</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.67-68.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 68.

mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan besar pada perekonomian karena orang-orang akan cenderung mengirimkan dananya untuk berinvestasi di luar negeri daripada berinvestasi di dalam negeri (*capital outflow*);

3. *Hyper Inflation*: inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai trilyunan persen per tahun. Walaupun sepertinya banyak pemerintahan yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi *galloping inflation*, akan tetapi tidak pernah ada pemerintahan yang dapat bertahan menghadapi inflasi jenis ketiga yang amat 'mematikan' ini. Contohnya adalah Weimar Republic di Jerman pada tahun 1920-an.<sup>20</sup>

Selain itu, menurut Adiwarman A. Karim inflasi dapat digolongkan karena penyebab-penyebabnya yaitu sebagai berikut:

1. *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*: Sesuai dengan namanya *Natural Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. *Human Error Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri;
2. *Actual/Anticipated/Expected Inflation* dan *Unanticipated/Unexpected Inflation*. Pada *Expected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi atau secara notasi,  $r_t^e = R_t - \pi_t^e$  sedangkan pada *Unexpected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi;
3. *Demand Pull* dan *Cost Push Inflation*. *Demand Pull Inflation* diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi Permintaan Agregatif (AD) dari

---

<sup>20</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi I*, Terj. A. Jaka Wasana M, Jakarta: Erlangga, h. 298-303.



barang dan jasa pada suatu perekonomian. *Cost Push Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi Penawaran Agregatif (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian;

4. *Spiralling Inflation*. Inflasi jenis ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya;
5. *Imported Inflation* dan *Domestic Inflation*. *Imported Inflation* bisa dikatakan adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi *price taker* dalam pasar perdagangan internasional. *Domestic Inflation* bisa dikatakan inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya.<sup>21</sup>

Boediono menggolongkan inflasi dalam tiga penggolongan:

1. Penggolongan pertama didasarkan atas “parah” tidaknya inflasi tersebut yang meliputi:
  - a. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
  - b. Inflasi sedang (antara 10 – 30% setahun)
  - c. Inflasi berat (antara 30 – 100%)
  - d. Hiperinflasi (di atas 100% setahun)
2. Penggolongan kedua didasarkan atas dasar sebab musabab awal dari inflasi yang meliputi:
  - a. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut *demand inflation*
  - b. Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Ini disebut *cost inflation*

---

<sup>21</sup> Karim, *Ekonomi ...*, h. 138.

3. Penggolongan ketiga didasarkan atas “asal dari inflasi” yang meliputi:

- a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*). Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen yang gagal, dan sebagainya.
- b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*). Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga (yaitu, inflasi) di luar negeri atau di negara-negara langganan berdagang.<sup>22</sup>

Menurut Sadono Sukirno bahwa berdasarkan pada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.
- b. Inflasi desakan biaya, inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah.
- c. Inflasi diimpor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya kenaikan harga minyak.

---

<sup>22</sup> Boediono, *Ekonomi Makro ...*, h. 156-158.

<sup>23</sup> Sukirno, *Pengantar ...*, h. 303.

#### D. Dampak dari Inflasi

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain *self feeding inflation*
2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *marginal propensity to save*);
3. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah (naiknya *marginal propensity to consume*);
4. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) seperti; tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.<sup>24</sup>

Selain itu, inflasi juga mengakibatkan masalah-masalah yang berhubungan dengan akuntansi seperti:

1. Apakah penilaian terhadap aset tetap dan aset lancar dilakukan dengan metode biaya historis atau metode biaya aktual?
2. Pemeliharaan modal riil dengan melakukan isolasi keuntungan inflasioner;
3. Inflasi menyebabkan dibutuhkan koreksi dan rekonsiliasi operasi (*index*) untuk mendapatkan kebutuhan perbandingan waktu dan tempat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Karim, *Ekonomi ...*, h. 139.

<sup>25</sup> *Ibid.*,

Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitor dan produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat menurut Prathama Rahardja dan Manurung misalnya:

a. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.

b. Memperburuk distribusi pendapatan

Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Akan tetapi, bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya. Dengan demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan menjadi semakin tidak merata.<sup>26</sup>

Dampak lainnya dirasakan pula oleh para penabung, oleh kreditor atau debitor, dan oleh produsen. Dampak inflasi bagi para penabung ini menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Tabungan memang menghasilkan bunga, tetapi jika tingkat inflasi di atas bunga, tetap saja nilai mata uang akan menurun. Bila orang sudah enggan menabung, maka dunia

---

<sup>26</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, Jakarta: FEUI, 2004, h. 169.

usaha dan investasi akan sulit untuk berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat yang disimpan di bank.

Adapun dampak inflasi bagi debitur atau yang meminjamkan uang kepada bank, inflasi ini justru menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibanding pada saat meminjam, tetapi sebaliknya bagi kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman.

Begitu pun bagi produsen, inflasi bisa menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya. Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya.

Sedangkan dampak inflasi bagi perekonomian secara keseluruhan, misalnya prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan semakin memburuk. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak rencana jangka panjang para pelaku ekonomi. Inflasi jika tidak cepat ditangani, maka akan susah untuk dikendalikan, inflasi cenderung akan bertambah cepat. Dampak inflasi bagi perekonomian nasional di antaranya:

- a. investasi berkurang;
- b. mendorong tingkat bunga;
- c. mendorong penanam modal yang bersifat spekulatif;
- d. menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan;
- e. menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang;
- f. menyebabkan daya saing produk nasional berkurang;
- g. menimbulkan defisit neraca pembayaran;

- h. merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dari
- i. meningkatnya jumlah pengangguran.<sup>27</sup>

Banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi yang lunak (*mild inflation/creeping inflation*) dapat merangsang bisnis sektor untuk memperluas produksinya, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. Namun kalau tidak hati-hati inflasi yang lunak sekalipun dapat berubah menuju inflasi yang lebih hebat. Dalam inflasi, masyarakat cenderung enggan menabung, dan juga enggan pegang uang kas/tunai, sebab nilai riil uang terus merosot. Masyarakat cenderung lebih suka menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang.

Keadaan demikian akan mendorong timbulnya spekulasi perdagangan dan dapat menciptakan inflasi yang jauh lebih hebat (*hyper inflation*). Selain itu, dalam inflasi terjadi kenaikan harga-harga umum, namun kenaikan harga itu tidak selaras dan dengan intensitas yang sama adanya kenaikan harga umum juga akan menyebabkan harga barang ekspor menjadi mahal, sehingga barang ekspor akan menjadi sulit bersaing di pasar internasional.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa inflasi akan menyebabkan nilai riil setiap satuan uang merosot, sehingga mereka yang berpendapatan tetap (nilai nominalnya), daya belinya terus merosot. Demikian pula mereka yang meminjamkan uang akan sangat dirugikan. Sebab pada saat jatuh tempo mereka akan menerima uang mereka dengan nilai riil lebih rendah. Dalam inflasi kenaikan harga barang berjalan dengan intensitas yang sama akan menguntungkan pihak-pihak yang memiliki faktor produksi ataupun barang dan jasa yang mengalami intensitas kenaikan paling tinggi.

---

<sup>27</sup> Nurul Huda, et al., *Ekonomi ...*, h. 181.

<sup>28</sup> Carla Poli, et al., *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Terj. Arifinal Chaniago, Jakarta: Aptik, 2012, h. 298.

Sebab, mereka akan menikmati *capital gain* (keuntungan yang didapat karena adanya kenaikan harga) yang paling tinggi. Dalam keadaan inflasi mereka yang mempunyai kekayaan lebih banyak jauh lebih bisa bertahan dari mereka yang lebih miskin. Orang mengatakan yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin (secara relatif paling tidak). Dengan demikian inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan di antara masyarakat dan menjauhkan tercapainya keadilan yang dicita-citakan.

#### **E. Kebijakan-kebijakan Mengatasi Inflasi**

Mewujudkan inflasi nol persen secara terus menerus dalam perekonomian yang sedang berkembang adalah sulit untuk dicapai. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang yang perlu diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang sangat rendah. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah perlu menjalankan kebijakan menurunkan tingkat inflasi karena bagaimanapun pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam mengendalikan laju inflasi sebab terjadi atau tidaknya inflasi tergantung dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah inflasi yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

##### **1. Kebijakan Fiskal**

Ditinjau secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan (*policy*) diberi arti yang bermacam-macam, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.<sup>29</sup> Seorang ahli, James E. Anderson merumuskan kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian

---

<sup>29</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, h. 15-16.

aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.<sup>30</sup> Fiskal yaitu 1) berhubungan dengan soal-soal finansial Fiskal yaitu 1) berhubungan dengan soal-soal finansial; 2) pada waktu ini istilah fiskal digunakan dalam arti khusus yang berlawanan dengan istilah “moneter”. Fiskal berhubungan dengan “fisc” yaitu aspek finansial pemerintah,<sup>31</sup> sedangkan *fiscal policy* (kebijakan fiskal) adalah suatu instrumen manajemen permintaan (*demand management*) yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak (*taxation*) dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*).<sup>32</sup>

Secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan *government expenditure*).<sup>33</sup> Menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi.<sup>34</sup>

Menurut Sadono Sukirno kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.<sup>35</sup> Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan

---

<sup>30</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Reformulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, h. 2.

<sup>31</sup> Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Bandung: Alumni, 2005, h. 210.

<sup>32</sup> Collins, *Kamus Lengkap Ekonomi*, terj. Tumpul Rumaepa dan Posman Haloho, Jakarta: Airlangga, 1994, h. 232.

<sup>33</sup> Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006, h. 203.

<sup>34</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h. 159

<sup>35</sup> Sukorno, *Pengantar ...*, h. 170.



maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat (keseluruhan) dalam perekonomian.<sup>36</sup>

Berpijak pada rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, defisit, atau surplus.

Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun (1404) mengajukan obat untuk resesi berupa mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar bila pasar yang lain pun akan ikut menurun, bahkan dalam agregat (keseluruhan) yang lebih besar." Laffer, penasihat ekonomi Presiden Ronald Reagan, yang menemukan teori *Laffer's Curve*, berterus terang bahwa ia mengambil ide Ibnu Khaldun.

Selain itu, Abu Yusuf (798) adalah ekonom pertama yang menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya, *al-Kharaj*, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Abu Yusuf sangat menentang adanya pajak atas tanah pertanian dan menyarankan diganti dengan zakat pertanian yang dikaitkan dengan jumlah hasil panennya. Abu Yusuf membuat rincian bagaimana membiayai pembangunan jembatan, bendungan, dan irigasi.<sup>37</sup>

Di zaman Rasulullah SAW., sisi penerimaan APBN terdiri atas *kharaj* (sejenis pajak tanah), zakat, *kums* (pajak 1/5), *jizyah* (sejenis pajak atas badan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 25.

<sup>37</sup> Karim, *Ekonomi ...*, h. 25.

orang nonmuslim), dan penerimaan lain-lain (di antaranya *kaffarah*/denda). Di sisi pengeluaran, terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai.<sup>38</sup>

Penerimaan *zakat* dan *kums* dihitung secara proporsional, yaitu dalam persentase dan bukan ditentukan nilai nominalnya. Secara ekonomi makro, hal ini akan menciptakan *built-in stability*. Ia akan menstabilkan harga dan menekan inflasi<sup>39</sup> ketika permintaan agregat (keseluruhan) lebih besar daripada penawaran agregat. Dalam keadaan stagnasi, misalnya permintaan agregat turun menjadi lebih kecil daripada penawaran agregat, ia akan mendorong ke arah stabilitas pendapatan dan total produksi.

Sistem zakat perniagaan tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran karena zakat dihitung *dari* hasil usaha. Dalam istilah finansialnya disebut *tax on quasi rent*. Ini berbeda dengan sistem pajak pertambahan nilai (PPN) yang populer sekarang; PPN dihitung atas harga barang sehingga harga bertambah mahal dan jumlah yang ditawarkan lebih sedikit atau dalam istilah ekonominya *up-ward shift on supply curve*.<sup>40</sup>

Khusus untuk zakat ternak, Islam menerapkan sistem yang progresif untuk memberikan insentif meningkatkan produksi. Makin banyak ternak yang dimiliki makin kecil *rate* zakat yang *harus* dibayar. Ia akan mendorong

---

<sup>38</sup> Perlu dibedakan antara pengertian kebijakan fiskal dengan pengertian kebijakan moneter. Menurut Boediono, kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah atau bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum dari kebijaksanaan moneter. Secara lebih khusus, kebijaksanaan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah (bank sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar. Dengan mempengaruhi jumlah uang beredar pemerintah bisa mempengaruhi tingkat bunga yang berlaku di pasar uang. Lihat Boediono, *Ekonomi Makro* ..., h. 96.

<sup>39</sup> Menurut Adiwarman Karim, inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Lihat Karim, *Ekonomi Makro* ..., h. 135.

<sup>40</sup> Karim, *Ekonomi Islam*..., h. 26.

tercapainya skala produksi yang lebih besar dan terciptanya efisiensi biaya produksi. Sistem progresif ini hanya berlaku untuk zakat ternak karena bila terjadi kelebihan pasokan, ternak tidak akan busuk seperti sayur atau buah-buahan. Harga tidak akan jatuh karena kelebihan pasokan.

Administrasi yang baik terbukti menimbulkan kepercayaan bagi rakyat pembayar zakat dan sebaliknya. Di zaman Umar ibnul-Khaththab, penerimaan baitul mal mencapai 160 juta dirham; di zaman al-Hajaj hanya mencapai 18 juta dirham; dan di zaman Umar ibn Abdil Aziz naik mencapai 30 dan 40 juta dirham pada tahun pertama dan kedua masa pemerintahannya. Di sisi pengeluaran, pembangunan infrastruktur mendapat perhatian besar. Umar ibnul Khaththab memerintahkan Amr ibn Ash, Gubernur Mesir, untuk membelanjakan sepertiga APBN untuk hal ini. Dia melakukan penggalian kanal dari Fustat (Kairo) ke Suez untuk memudahkan transportasi dagang antara Semenanjung Arab dan Mesir. Juga pembangunan dua kota bisnis: Kufah (untuk bisnis dengan Romawi) dan Basrah (bisnis dengan Persia).<sup>41</sup>

APBN jarang sekali mengalami defisit, yaitu pengeluaran hanya dapat dilakukan bila ada penerimaan. Pernah sekali mengalami defisit, yaitu sebelum Perang Hunain, namun segera dilunasi setelah perang. Di zaman Umar dan Utsman r.a., malah APBN mengalami surplus. Dengan tidak ada defisit berarti tidak ada uang baru dicetak dan ini berarti tidak akan terjadi inflasi yang disebabkan ekspansi moneter.<sup>42</sup> Inflasi terjadi di zaman Rasulullah dan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan kebijaksanaan moneter, terutama untuk stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kalau kestabilan dalam kegiatan ekonomi terganggu, maka kebijaksanaan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Novirin, *Ekonomi Moneter*, Buku 1, Yogyakarta: BPFE, 1993, h. 45.

Khulafaur Rasyidin akibat turunnya pasokan barang ketika musim paceklik atau ketika perang.<sup>43</sup>

## 2. Kebijakan Moneter

Secara etimologi, kata moneter berarti sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan mata uang,<sup>44</sup> berhubungan dengan uang atau keuangan.<sup>45</sup> Ada pula yang mengartikan moneter berarti “segala sesuatu mengenai uang”.<sup>46</sup> Demikian pula S. Wojowasito mengartikan *monetary* sebagai “mengenai uang atau keuangan”.<sup>47</sup> Sedangkan sistem moneter berarti suatu istilah umum yang meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi mata uang negara tertentu.<sup>48</sup>

Dalam hubungannya dengan kebutuhan manusia, manusia yang hidup dalam suatu negara membutuhkan stabilitas perekonomian. Salah satu cara untuk menstabilkan perekonomian suatu negara ialah melalui kebijakan moneter yang tepat. Secara terminologi, Boediono merumuskan:

Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah atau bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum dari kebijaksanaan moneter. Secara lebih khusus, kebijaksanaan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah (bank sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar. Dengan mempengaruhi jumlah uang beredar pemerintah bisa mempengaruhi tingkat bunga yang berlaku di pasar uang.<sup>49</sup>

Sedangkan Novirin mendefinisikan kebijaksanaan moneter adalah

Tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada

---

<sup>43</sup> Karim, *Ekonomi Islam...*, h. 26.

<sup>44</sup> Habeyb, *Kamus Populer*, Jakarta: Centra Utama, 1980, h. 229

<sup>45</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbut, Balai Pustaka, 2002, h. 753.

<sup>46</sup> O.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985, h. 194.

<sup>47</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*, Bandung: Alumn, tth, h. 243.

<sup>48</sup> Winardi, *Kamus ...*, h. 337.

<sup>49</sup> Boediono, *Ekonomi ...*, h. 96

gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan kebijaksanaan moneter, terutama untuk stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kalau kestabilan dalam kegiatan ekonomi terganggu, maka kebijaksanaan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).<sup>50</sup>

Pada dasarnya instrumen/alat kebijaksanaan yang dipakai adalah pertama, instrumen yang umum, meliputi: (politik pasar terbuka, politik cadangan minimum, dan politik diskonto). Kedua, instrumen yang selektif, meliputi: (*margin requirement*, dan pembatasan/penentuan tingkat bunga), yang kesemuanya ini untuk mempengaruhi alokasi kredit untuk sektor-sektor ekonomi tertentu. Ketiga, instrumen yang sering disebut dengan “*moral suasion*” atau *open mouth policy*. Di samping itu, penentuan tingkat bunga, pengaturan sistem perbankan serta devaluasi termasuk juga dalam instrumen kebijaksanaan moneter.<sup>51</sup>

Dewasa ini, ekonomi moneter menjadi suatu cabang yang penting dalam ilmu ekonomi. Salah satu sebabnya ialah, karena uang memegang peranan penting dalam lapangan hidup manusia. Juga karena uang memegang peranan dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Harga uang sesuatu negeri dalam hubungannya dengan harga uang negeri lainnya, menjadi indikator bagaimana kedudukan perdagangan negara yang bersangkutan dalam dunia pada umumnya. Persoalan uang itu bukan saja penting dalam hubungannya dengan perekonomian nasional, tetapi juga penting dalam hubungannya dengan perekonomian dunia. Sangat penting bagi suatu negara, untuk menjamin kestabilan harga uangnya dan kalau mungkin menaikkan harga uang tersebut dalam hubungannya dengan harga uang asing di luar negeri. Salah satu usaha

---

<sup>50</sup> Novirin, *Ekonomi ...*, h. 45.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 45-46

untuk mencapai maksud itu adalah dengan politik keuangan, yang menjadi lingkungan ekonomi moneter.<sup>52</sup>

Pada awalnya, uang merupakan hal yang sekunder dalam teori ekonomi. Tapi lambat laun merupakan hal atau bagian penting dalam teori ekonomi. Karena uang itu merupakan suatu alat yang penting dalam lalu lintas perekonomian suatu negara, dan pengaruhnya sangat besar, maka dirasa perlu mengadakan teori umum tersendiri dengan menyelidiki seluk beluk uang. Teori yang secara khusus mempelajari uang dan hubungan-hubungannya itu disebut teori moneter, dan ilmu ekonomi yang mengkhususkan perhatiannya untuk mempelajari uang itu disebut ekonomi moneter.<sup>53</sup>

Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi.<sup>54</sup> Inti dari teori moneter adalah analisa mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan akan uang, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penawaran akan uang.<sup>55</sup>

Uang, dalam teori moneter bisa didefinisikan secara sempit atau secara luas, tergantung pada teori moneter yang mana yang dibicarakan. Ada teori moneter yang mengartikan “uang” sebagai benda yang dikeluarkan oleh pemerintah (uang chartal), ada yang mengartikannya sebagai uang chartal dan saldo-saldo rekening koran. Ada juga yang memasukkan di dalam definisi uang adalah juga saldo-saldo defosito berjangka. Sedangkan definisi uang yang paling luas mencakup semua alat-alat *likuid* (surat-surat berharga, hubungan kredit, dan hutang-hutang jangka pendek dan sebagainya). Di antara definisi-definisi ini,

---

<sup>52</sup> M. Manullang, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, h. 11-12.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 12.

<sup>54</sup> Novirin, *Ekonomi ...*, h. 1

<sup>55</sup> Boediono, *Teori ...*, h. 1.

definisi uang sebagai uang kas (*chartal*) plus saldo-saldo rekening koran adalah paling umum dipakai dan yang mempunyai “teori” yang paling mantap.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*

### **BAB III**

#### **PENDAPAT M. UMER CHAPRA TENTANG UPAYA MENEKAN INFLASI**

##### **A. Biografi M. Umer Chapra, dan Karyanya**

M. Umer Chapra dilahirkan dan dibesarkan di Pakistan. Ia memperoleh gelar doktor dalam ilmu ekonomi dari Universitas Minnesota di Amerika Serikat.<sup>1</sup> Pendidikan S2 (Master) di Karachi dan S3 (Ph.D) di Minnesota. Ia memiliki pengalaman mengajar dan meneliti di bidang ekonomi.<sup>2</sup> M. Umer Chapra adalah ekonom kelahiran Pakistan. Mengajar di beberapa perguruan Tinggi di Amerika Serikat. Ia lebih dikenal dengan M.Umer Chapra, dilahirkan di Pakistan pada bulan Pebruari tahun 1933. Dia adalah seorang ekonom profesional dan seorang sarjana Islam yang mempunyai komitmen. Pada dirinya seseorang akan melihat gabungan model baru kesarjanaan Islam, dimana arus pengetahuan tradisional dan modern saling memenuhi satu sama lain.

Hal ini dapat dilihat dari perjalanan akademiknya. Pada tahun 1950 dia mengikuti ujian masuk di Universitas Karachi, Pakistan. Setelah mendapatkan gelar B. Com. (= BBA) dan M.Com. (= MBA), keduanya dari Universitas Karachi pada tahun 1954 dan tahun 1956, dia memperoleh gelar Ph.D dalam bidang ekonomi pada tahun 1961 dengan predikat *cum laude* dari Universitas Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, Terj. Machnun Husein, Jakarta: CV Rajawali, 1984, h. 410.

<sup>2</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001, h. 59.

<sup>3</sup> Biografi M.Umer Chapra dalam "Introduction of Dr..M. M.Umer Chapra", <http://www.geogle.com/M.Umer Chapra/biografi.htm>, diakses 25 Maret 2015.



Nama M.Umer Chapra selalu melekat dengan sejumlah lembaga- lembaga riset akademik bergengsi. Pada tahun 1961 tidak lama setelah kembalinya ke Pakistan, dari Amerika Serikat, dia bergabung dengan *Central Institute of Islamic Research* selama dua tahun dan secara sistematis mengkaji gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam tradisi Islam yang menurut pandangannya dapat memenuhi premis intelektual bagi sebuah sistem ekonomi yang sehat. Di samping bergabung sebagai *reader (associate professor)* pada *Central Institute of Islamic Research*, dia juga bekerja sebagai ekonom senior dan *Associate Editor* pada *Pakistan Development Review* di *Pakistan Institute of Economic Development*.<sup>4</sup>

Pada tahun 1964, M.Umer Chapra berangkat kembali ke Amerika Serikat. Dia mempunyai pengalaman yang luas dalam mengajar di berbagai universitas dan institusi profesional di antaranya: *Harvard Law School*, Universitas Autonom, Madrid, Universitas Loughborough, U.K., *Oxford Center for Islamic Studies*, *London School of Economic*, Universitas Malaga, Spanyol. Setelah mengajar ekonomi di beberapa Universitas di Amerika Serikat selama beberapa tahun, M.Umer Chapra bergabung dengan *Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA)*, Riyadh, sebagai penasehat ekonominya dan pensiun dari lembaga ini pada tahun 1999. Dia juga bekerja sebagai penasehat riset pada *Islamic Research and Training Institute (IRTI)* di *Islamic Development Bank (IDB)*, Jeddah. Posisi ini menyebabkan M.Umer Chapra aktif dalam membangun ekonomi Arab Saudi. Sebagai penghargaan atas jasanya pada tahun 1983 M.Umer Chapra dianugerahi kebangsaan Arab oleh King Khalid atas permohonan Menteri Keuangan Syekh Muhammad Abd al-Khail.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Surabaya Risalah Gusti, 1999, h. xxii – xxiii.

<sup>5</sup> Donohue dan Esposito, *Islam ...*, h. 410.

Selain itu M.Umer Chapra juga aktif dalam berbagai organisasi internasional dan regional, seperti IMF, IBRD, OPEC, IDB, OIC, dan GCC. Di bidang jurnalistik, dia aktif sebagai dewan pengurus redaksi dalam berbagai jurnal, termasuk *Economic Jurnal of The Royal Economic Society*, U.K. Di samping aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, M. Umer Chapra juga aktif memberikan ceramahnya secara teratur mengenai al-Qur'an, hadis, dan fiqh. M.Umer Chapra menerima banyak penghargaan karena gagasan-gagasannya yang cemerlang. Pada tahun 1990, dia mendapat penghargaan *Islamic Development Bank Award* karena pengabdianya pada ekonomi Islam dan *King Faisal Internasional Price* untuk kajian Islam. Pada bulan Agustus 1995, M.Umer Chapra mendapat medali emas dari *Institute of Overseas Pakistanis* (IOP) yang diserahkan langsung oleh Presiden Pakistan pada konferensi pertama IOP di Islamabad.<sup>6</sup>

Berbagai kegiatan yang menyita perhatian M.Umer Chapra, mulai dari mengajar, riset dan merumuskan kebijakan, tidak menyurutkan semangatnya untuk berkarya dalam hal tulis menulis. Hal ini dapat dilihat pada beberapa tulisannya baik dalam bentuk buku maupun artikel. M.Umer Chapra menjadi sangat terkenal karena sumbangan pemikirannya bagi ekonomi dan keuangan Islam selama lebih dari tiga dasawarsa terakhir. Di tengah-tengah kesibukannya mengajar di berbagai universitas, dia tetap tidak meninggalkan kebiasaan baiknya untuk menulis, terbukti lebih dari 12 buku sudah dia susun, 70 naskah dan sembilan buku ulasan. Beberapa di antara karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, diantaranya Bahasa Perancis, Jepang, Jerman, Spanyol, Polandia, Arab, Urdu, Turki, Malaysia, Indonesia dan Bangladesh.

---

<sup>6</sup> Biografi M. Umer Chapra dalam *Introduction of Dr..M. M.Umer Chapra*, [http://www.google.com/M.Umer Chapra/biografi.htm](http://www.google.com/M.Umer%20Chapra/biografi.htm), diakses 25 Maret 2015. Lihat juga Chapra, *Islam dan Tantangan ...*, h. xxiii. M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwani Abidin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. xvi – xvii

Buku pertama yang ditulis M.Umer Chapra berjudul "*The Economic System of Islam: A Discussion of It's Goals and Nature*", diterbitkan oleh *The Islamic Foundation* tahun 1970. Karyanya yang lain diterbitkan oleh penerbit yang sama pada tahun 1970 adalah *The Islamic Welfare State and It's Role in The Economy*.

Di antara karya-karya M.Umer Chapra yang sangat terkenal dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah:

- a. *Toward a Just Monetary System* (diterbitkan oleh The Islamic Foundation, Leicester, 1985), dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2000). Buku inilah yang telah membawanya memperoleh medali bergengsi, yaitu *Islamic Development Bank Award* dan *King Faisal International Price* (1990) dan telah menegaskan kredensialnya sebagai tokoh intelektual terkemuka yang sangat berpengaruh di dalam dunia Islam.

Buku ini berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan analisa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sistem perbankan dan keuangan Islam, di mana penghapusan riba merupakan salah satu jawaban atas persoalan-persoalan ekonomi yang ingin ditegakkan dalam menciptakan keadilan sosioekonomi.

- b. *Islam and Economic Development* (diterbitkan oleh International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, Herndon, 1989) dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta; Gema Insani Press, 2000).<sup>7</sup>

Buku ini merupakan versi yang telah diperluas dari sebuah paper yang dipresentasikan M.Umer Chapra pada sebuah seminar tentang ekonomi Islam

---

<sup>7</sup> Yuliadi, *Ekonomi ...*, h. 59.

yang diadakan di Kairo bulan September 1988 di bawah sponsor *International Institute of Islamic Thought*, Herndon, VA (USA) dan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.<sup>8</sup>

- c. *Islam and The Economic Challenge* (diterbitkan oleh *the Islamic Foundation and the International Institute of Islamic Thought*, Herndon, 1995) dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul: *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Dalam karya ilmiah ini M.Umer Chapra mengkaji dengan kecanggihan dan ketelitian seorang pakar terhadap tiga sistem ekonomi Barat dan berakhir dengan suatu lembaran neraca realistis dari prestasi-prestasinya maupun kegagalan-kegagalannya. Dia juga mengemukakan pendekatan Islam terhadap ekonomi dan persoalan-persoalannya serta mengajukan saran-saran konkrit bagi restrukturisasi perekonomian dunia Islam, sekaligus memperlihatkan jalan-jalan baru menuju perencanaan pembangunan.

- d. *The Future of Economic: An Islamic Perspective* (diterbitkan oleh *The Islamic Foundation*, Leicester, 2000) dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).<sup>9</sup>

Buku ini merupakan elaborasi yang lebih rinci dari gagasan-gagasan yang disampaikan M.Umer Chapra dalam suatu ceramah di gedung *Islamic Development Bank*, Jeddah, pada tanggal 29 Oktober 1990, Sejak itu, ceramah tersebut dipublikasikan oleh IDB sebagai suatu monograf dengan judul *what is islamic economic?*

---

<sup>8</sup> Muslim H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 51-52.

<sup>9</sup> Chapra, *Islam dan Pembangunan ...*, h. xvii

*The Future of Economics: An Islamic Perspective* merupakan suatu kontribusi seminar bukan saja bagi literatur ekonomi Islam, melainkan juga bagi perdebatan ekonomi kontemporer. Pesan dari buku ini adalah bahwa ilmu ekonomi membutuhkan pengayaan moral dari perspektif Islam sehingga ia benar-benar berguna bagi umat manusia dalam mencari tatanan dunia yang adil.<sup>10</sup>

**Ditinjau dari segi aliran** yang dianut, M. Umer Chapra menganut aliran pragmatis. Hal ini seperti ditegaskan M. Dawam Rahardjo dalam kata pengantar buku M. Umer Chapra, bahwa “dengan memperhatikan wacana pembangunan yang menjadi inti karya-karya M. Umer Chapra dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada dasarnya Chapra memilih pendekatan atau aliran pragmatis”.<sup>11</sup> **Ditinjau dari segi orang-orang yang berpengaruh** dalam pemikiran-pemikirannya M. Umer Chapra di antaranya yaitu M. Anas Zarqa, M. Nejatullah Siddiqi, Zianuddin Ahmad, Sayyid Abul A’la Maududi, Anwar Iqbal Quraishi, Shaikh Mahmud Ahmad, Nim Siddiqi, Muhammad Uzair, Isa Abdullah, Abdallah al-Arabi, Ahmad A. Najjr, Muhammad Baqir al-Sadr, dan Sami Hamud.<sup>12</sup>

## **B. Corak Pemikiran M. Umer Chapra**

Posisi M. Umer Chapra termasuk ekonom modernis yang tidak menyukai dalil tapi logika berpikirnya selalu didasarkan pada ajaran Islam. Dalam melihat sektor perbankan, ia mendasari pemikirannya pada ajaran Islam. Pada dirinya seseorang akan melihat gabungan model baru kesarjanaan Islam, dimana arus pengetahuan tradisional dan modern saling memenuhi satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan akademiknya dan karya-karyanya. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam M. Umer Chapra merefleksikan keunikannya, dan dari keunikannya

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 52.

<sup>11</sup> Chapra, *Islam dan Tantangan ...*, h. xix.

<sup>12</sup> M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. xx – xxi.

itu sekaligus sebagai kelebihanannya dibandingkan dengan ekonom lainnya.<sup>13</sup> Kelebihanannya dapat dikemukakan dalam beberapa hal.

*Pertama*, pandangan dan pemikirannya komprehensif dan integratif mengenai sistem keuangan dan perbankan Islam, menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya. Ia melihat ekonomi moneter dan perbankan Islam dalam perspektifnya yang tepat. Dalam hal ini, ia memenuhi kebutuhan besar dan berfungsi sebagai antibodi terhadap sebagian penyakit rasa puas yang menimpa kalangan-kalangan Islam. Ia tidak saja mengulang pernyataan posisi Islam terhadap perbankan, dan finansial dalam suatu cara yang otentik komprehensif dan tepat, melainkan juga mengidentifikasi kesenjangan dalam beberapa pendekatan yang berlaku.

Ia juga merupakan suatu peringatan yang tepat waktu terhadap pendekatan-pendekatan yang parsial. Penekanan M.Umer Chapra pada perubahan struktural, pada perlunya membersihkan kehidupan ekonomi dari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan serta terhadap saling ketergantungan dari berbagai unsur dalam lingkup kehidupan Islam, tidak saja merupakan pengingat yang tepat, melainkan juga berfungsi sebagai agenda kuat untuk reformasi dan rekonstruksi masa depan umat Islam dalam menata sistem perbankan

*Karakteristik kedua* dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori dengan praktik. M Umer Chapra dengan sangat baik mengembangkan argumen yang jitu dalam menggulirkan konsep moneter dan perbankan Islam.<sup>14</sup> Dari sini tampaknya ia telah berhasil menunjukkan dengan ketelitian akademik tidak saja kebaikan, melainkan juga keunggulan sistem ekonomi khususnya moneter Islam. Ia tidak saja melihat ulang secara kritis perbankan Islam yang berlaku, melainkan juga

---

<sup>13</sup> Yuliadi, *Ekonomi ...*, h. 59.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 60

mengajukan saran-saran orisinal untuk meningkatkannya dan memungkinkannya mencapai tujuan-tujuan Islam secara lebih efektif.

*Ketiga*, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah meningkatkan tingkat perdebatan mengenai ekonomi moneter dan perbankan Islam oleh analisis yang teliti dari sebagian konsekuensi pokok, oleh evaluasi kritis dari sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan yang relevan.<sup>15</sup> Evaluasinya tentang sebagian usulan dari laporan Dewan Ideologi Islam Pakistan telah memperkaya perdebatan. Pandangannya tentang penciptaan kredit, ekspansi moneter dan perbankan patut dipertimbangkan, karena kebijakan moneter dan perbankan dapat menyelamatkan umat Islam secara makro dari keterpurukan ekonomi selama ini.

Meskipun pemikirannya mencakup nilai yang luas dalam bidang ilmu ekonomi moneter dan perbankan, namun pembahasan tentang hubungan perbankan dan moneter internasional dan bagaimana membersihkan dari riba dan bentuk-bentuk eksploitasi lain perlu dikembangkan, diperkokoh, dan diperluas dalam beberapa hal.

Berpijak dari itu semua, tampaknya para ekonom muslim lain akan terus menghadapi tantangan yang datang dari sistem perbankan dan moneter dunia. Untuk itu perlu dikembangkan visi yang lebih tegas tentang sistem perbankan dan moneter internasional yang bebas dari unsur eksploitasi dan mengarah kepada munculnya sebuah tata ekonomi dunia yang adil.

Adapun kekurangannya, bahwa M.Umer Chapra dalam menguraikan kebijakan perbankan dan keuangan yang bercorak islami terlalu singkat padahal materi dan cakupan dari sistem keuangan dan perbankan demikian luas, sehingga

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 60

solusi yang ditawarkan masih terlalu umum dan bersifat global. Dengan demikian masih perlu rincian lebih spesifik. Jika pendapatnya diaplikasikan maka akan terasa bahwa konsepnya masih terlalu murni, artinya konsep yang ditawarkan sulit diaplikasikan dan lebih tepat dijadikan wacana, namun demikian, terlepas dari kekurangannya, bila melihat pemikirannya tampak sangat menarik.

Ia adalah seorang ekonom kenamaan dan seorang sarjana Islam yang mempunyai komitmen. Pada dirinya, seseorang akan melihat gabungan model baru kesarjanaan Islam, di mana arus pengetahuan tradisional dan modern saling memenuhi satu sama lain. Mendapatkan pendidikan di Karachi (M.Com.) dan Minnesota (Ph.D.), ia memiliki sumber pengetahuan terbaik dari pusat pendidikan ekonomi modern. Dia bekerja keras, sangat berhasil menguasai bahasa Arab dan kajian Islam dari sumber-sumber yang asli. Dia telah melakukan pengajaran penting dan riset.

Dengan demikian, pengalamannya mencakup sebuah bidang yang luas, mulai dari mengajar, riset, dan perumusan kebijakan. Ilmu ekonomi moneter (*monetary economics*) adalah spesialisasinya. Dia telah berpartisipasi dalam sejumlah besar konferensi nasional, termasuk konferensi dan seminar tentang ilmu ekonomi dan keuangan dan menyumbang banyak pada kesempatan-kesempatan ini. *Towards a Just Monetary System* mewakili inti pikirannya dan kontribusinya pada subjek ini.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 61



### C. Pendapat M. Umer Chapra tentang Upaya Menekan Inflasi

#### 1. Dampak Inflasi

Menurut Chapra, stabilitas dalam nilai uang tidak bisa dilepaskan dari tujuan dalam kerangka referensi yang Islami karena hal ini ditekankan Islam secara jelas mengenai ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan semua manusia.<sup>17</sup> Al Qur'an dengan tegas menekankan perlunya ketulusan dan keadilan dalam nilai semua ukuran:

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ... (الأنعام: ١٥٢)

Artinya: Dan berikanlah ukuran yang penuh dan timbangan dengan adil. (QS. Al An'aam : 152).<sup>18</sup>

Ukuran-ukuran ini tidak hanya berlaku bagi individu tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Uang juga merupakan ukuran dari nilai, setiap penggerogotan yang sifatnya terus-menerus dan sangat berarti menurut ajaran Islam ini dapat ditafsirkan sama dengan membuat kerusakan di bumi karena hal ini dapat berakibat pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum.<sup>19</sup>

Menurut Chapra, inflasi mempunyai pengertian bahwa uang tidak dapat digunakan sebagai nilai tukar yang adil dan jujur. Ini menjadikan uang sebagai alat pembayaran yang tidak adil bagi penangguhan pembayaran dan penyimpanan nilai yang tidak dapat dipercaya. Uang dapat membuat sebagian orang menjadi tidak jujur kepada orang lain, bahkan meskipun tanpa disadari, dengan diam-diam merusak daya beli aset moneter.

---

<sup>17</sup> M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. 6.

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Jakarta, 1986, h. 278.

<sup>19</sup> Chapra, *Al-Qur'an*...h. 6.

Hal ini merusak efisiensi sistem moneter dan membebani harga kesejahteraan bagi masyarakat. Ini meningkatkan konsumsi dan mengurangi tabungan. Ini memperburuk iklim ketidakpastian yang di dalamnya keputusan-keputusan ekonomi diambil, menghambat pembentukan modal dan menjurus kepada penyalahgunaan sumber daya. Hal ini cenderung untuk mengubah nilai, mendorong spekulasi (yang tidak diinginkan oleh Islam) dengan dalih kegiatan produktif (sesuatu yang diidealisasikan oleh Islam) dan meningkatkan kesenjangan pendapatan (yang dikecam oleh Islam).<sup>20</sup>

Dengan demikian inflasi adalah simptom (gejala) dari ketidakseimbangan dan tidak cocok dengan penekanan Islam pada keseimbangan dan ekuilibrium. Menerima saja inflasi sama dengan menerima penyakit dan membiarkan hilangnya kemampuan perekonomian untuk bergerak secara reflek. Negara-negara yang mempunyai kemampuan besar untuk mengatasi tekanan-tekanan inflasi adalah yang paling berhasil dalam mencapai dan memelihara tingkat pertumbuhan ekonomi dan *employment* (tenaga kerja) yang lebih tinggi.

Inflasi di negara miskin ataupun kaya mempunyai konsekuensi yang sama dalam membuat distorsi (penyimpangan) *output* (hasil), meremehkan efisiensi dan investasi yang produktif dan dalam mendorong ketidakadilan dan ketegangan sosial. Satu-satunya cara untuk mengakhiri inflasi hanyalah menanggulangi akar sebab-sebabnya.<sup>21</sup>

Lebih dari itu, inflasi bertentangan dengan perekonomian bebas riba karena mengikis pelan-pelan keadilan sosial. Meskipun Islam menekankan keadilan kepada peminjam tidak berarti Islam setuju dengan perlakuan tidak adil

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>21</sup> *Ibid*

kepada pemberi pinjaman. Tidak perlu disangsikan lagi bahwa inflasi memperlakukan tidak adil kepada pemberi pinjaman tanpa riba. Ini berarti bahwa suatu kegiatan atau perilaku individu, kelompok atau lembaga yang jelas-jelas menggerogoti nilai nil uang dalam suatu masyarakat Islam mestinya diangkat sebagai isu nasional dan mendapat perhatian yang sepenuhnya. Meskipun demikian, masih ada tujuan-tujuan lain yang sama pentingnya atau sama besarnya.

Kalaupun terjadi konflik yang tidak bisa dielakkan lagi dalam merealisasikan tujuan-tujuan ini, sementara kompromi tidak bisa dielakkan lagi, maka tujuan untuk menstabilkan nilai riil bagi uang mungkin dapat ditangguhkan untuk sementara waktu kecuali jika kerusakan yang diakibatkan oleh penangguhan harus mengorbankan realisasi tujuan-tujuan nasional lain. Lagi pula penangguhan semacam itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang benar-benar perlu dan tidak boleh menjadi ciri yang melekat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan masyarakat Islam.<sup>22</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wajib bagi masyarakat Islam untuk mewujudkan keuangan, fiskal dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pendapatan yang sehat dan melakukan pengendalian langsung bila mana diperlukan, termasuk pengendalian harga untuk meminimalisir penggerogotan nilai riil uang guna mencegah satu kelompok masyarakat secara sadar ataupun tidak memperdaya pihak lain dan menjarah norma-norma Islam akan kejujuran dan keadilan dalam ukuran.

Ini tidak berarti bahwa masyarakat Islam, secara individual ataupun kolektif, dapat menstabilkan nilai mata uang mereka atas dasar upaya mereka

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 8.

sendiri. Di dunia yang kenyataannya semua negara sudah saling tergantung dan kenyataan bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter dan fiskal beberapa negara industri utama sangat berpengaruh pada instabilitas harga, hampir tidak mungkin bagi perekonomian yang kecil dan terbuka dari masing-masing masyarakat Islam untuk mencapai stabilitas yang diinginkan kecuali jika negara-negara industri utama juga mengikuti kebijaksanaan yang sehat itu. Meskipun demikian, apa yang diinginkan adalah bahwa suatu masyarakat Islam mestinya tetap kukuh dalam pendirian untuk ikut memberikan sumbangan apapun yang bisa dilakukan demi mencapai tujuan ini.<sup>23</sup>

## 2. **Inflasi menyebabkan perlunya kontrol harga dan subsidi**

Menurut Chapra, inflasi telah merebak, namun pada mulanya hal ini juga dijustifikasi. Kurva Phillips telah menyediakan rasionalitas yang diperlukan bagi para pembuat kebijakan dalam bentuk hubungan negatif antara inflasi di satu pihak dan pertumbuhan yang lebih tinggi serta kesempatan kerja di pihak yang lain. Mayoritas ekonom Keynesian kurang prihatin pada inflasi dan mereka tetap menggalakkan kebijakan-kebijakan ekspansioner selama periode pasca-Perang Dunia Kedua. Prof Henry Bruton, dalam rangkaian ceramahnya yang disampaikan di Universitas Bombay pada tahun 1961 menyatakan bahwa "kita dapat membuat inflasi menjadi suatu instrumen kebijakan dan bukannya mengontrol inflasi sebagai tujuan kebijakan". Tentu saja peringatan-peringatan diarahkan kepada *mismanagement* moneter dengan menyatakan bahwa "terlalu banyak mencetak uang hanya akan menimbulkan bahaya".<sup>24</sup>

Bagaimanapun juga, peringatan-peringatan seperti ini tidak pernah digubris oleh para perencana dan menteri keuangan di banyak negara

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>24</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 48

berkembang. Inflasi menawarkan "suatu pajak terselubung tanpa permisi". Tidak seperti pajak yang tinggi, inflasi tidak segera meningkatkan keributan politik, karena itu dipilih untuk membiayai defisit yang membengkak. Jika kemudian menimbulkan konsekuensi yang tidak menyenangkan maka hal itu hanya akan ditanggung oleh penggantinya dan bukan oleh mereka sendiri. Perilaku seperti ini memang sudah sepantasnya diharapkan terjadi dalam suatu sistem di mana keadilan sosioekonomi tidak menjadi suatu tujuan fundamental, sementara lomba kepentingan pribadi justru merupakan tujuan utama kehidupan. Tidak ada alasan untuk mengharapkan bahwa para birokrat dan pemimpin politik akan bertindak berbeda dalam suatu lingkungan yang bebas nilai.<sup>25</sup>

Inflasi cenderung meredistribusi pendapatan ke atas sehingga menimbulkan ketidakseimbangan terhadap sasaran keadilan sosioekonomi. Barangkali hal ini saja tidak cukup memberikan dorongan kepada para ekonom pembangunan untuk berpikir. Namun, banyak dampak buruk lainnya yang dirasakan oleh pembangunan dan keadaan ini akan terus berlanjut di masa mendatang.

Menurut Chapra, inflasi menyebabkan perlunya kontrol harga dan subsidi pada bahan makanan dan barang-barang esensial yang dikonsumsi. Sementara, kontrol harga akan menghambat pertumbuhan jangka panjang bagi pasokan barang-barang ini, subsidi justru menambah beban berat pada anggaran pemerintah (negara-negara sedang berkembang, yang kini sudah tidak tertanggung lagi. Inflasi juga menyebabkan kurs menjadi overnilai yang diadopsi oleh pemerintah untuk menahan tekanan-tekanan inflasioner.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 48

Hal ini akan menggalakkan impor dan menghambat ekspor dengan menjadikannya tidak kompetitif pada pasaran internasional. Pertanian adalah sektor yang paling dirugikan sebab mereka tidak mendapatkan dukungan seperti yang dinikmati oleh industri-industri besar. Akibatnya adalah ketergantungan pada impor meningkat dan defisit perdagangan luar negeri membengkak. Tentu saja hal ini akan meningkatkan pinjaman dan tambah memperparah beban cicilan utang.

Kendatipun pemerintah sekarang ingin-karena ada tekanan dari pihak IMF dan Bank Dunia-untuk menghilangkan kontrol harga dan subsidi dan mengadopsi kurs yang lebih realistis, namun mereka secara politik kesulitan untuk berbuat demikian karena dampak buruknya pada biaya hidup. Sir Arthur Lewis pada akhirnya berujar, "Pelajaran penting yang dapat kita petik, baik itu yang menyangkut negara berkembang maupun negara maju adalah bahwa inflasi itu memang suatu petaka."<sup>26</sup>

### 3. Kebijakan Moneter dan Fiskal

Menurut Chapra:

*To ensure that monetary growth is 'adequate' and not 'excessive' it would be important to monitor carefully all the three major sources of monetary expansion. Two of these are domestic and are: one, financing of government budget-ary deficits by borrowing from the central bank; and two, expansion of deposits through commercial bank credit creation. The third source of monetary growth is external and is 'monetisation' of the balance of payments surplus.*<sup>27</sup>

“Untuk menjamin bahwa pertumbuhan moneter "mencukupi" dan tidak "berlebihan", perlu memonitor secara hati-hati tiga sumber utama ekspansi moneter. Dua di antaranya adalah domestik. Pertama, membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral. Kedua, ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. Ketiga, bersifat eksternal, yaitu menguangkan surplus neraca pembayaran luar negeri”.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 49.

<sup>27</sup> Chapra, *Towards a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation, 1985, h. 190.

<sup>28</sup> Chapra, *Sistem ...*, h. 137.

Pada halaman lain, Chapra mengatakan:

*Hence, unless we wish monetary policy to become either ineffective or highly restrictive, it is imperative that there be coordination between monetary and fiscal policies for the realisation of national goals. This underscores the need for a realistic and non-inflationary fiscal policy in Muslim countries.*<sup>29</sup>

“Karena itu, kalau tidak ingin kebijakan moneter menjadi kurang efektif atau terlalu restriktif, harus ada koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk merealisasikan tujuan-tujuan nasional. Ini menggaris bawahi perlunya suatu kebijakan fiskal yang noninflasioner dan realistis di negara-negara muslim”.<sup>30</sup>

Gagasan Chapra tentang kebijakan moneter ia tuangkan dalam penjelasan yang cukup jelas. Ia mengatakan bahwa untuk menciptakan iklim pertumbuhan moneter yang memadai dalam arti mencukupi, dan tidak "berlebihan", perlu memonitor secara hati-hati tiga sumber utama ekspansi moneter sebagai berikut:<sup>31</sup>

*Pertama*, defisit fiskal. Menurutny tak ada kontroversi di kalangan para ekonom mengenai apakah defisit fiskal dapat dan memang telah dilakukan menjadi suatu sumber penting bagi ekspansi moneter "ekspansif".<sup>32</sup> Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil sumber-sumber riil pada laju yang lebih cepat dari yang berkesinambungan pada tingkat harga yang stabil, dapat menimbulkan peningkatan defisit fiskal dan mempercepat penawaran uang sehingga menambah laju inflasi.

Bahkan, di negara-negara industri utama, defisit fiskal yang besar telah menjadi sebab utama kegagalan memenuhi target suplai uang. Hal ini cenderung menggeser beban perjuangan dalam menghapuskan inflasi pada kebijakan

---

<sup>29</sup> Chapra, *Towards ...*, h. 190-191.

<sup>30</sup> Chapra, *Sistem ...*, h. 137.

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

moneter. Akan tetapi, seperti yang secara sangat tepat dinyatakan oleh para ekonom yang tergabung dalam *Economists Advisory Group Business Research Study*, "makin besar ketergantungan sektor pemerintah kepada sistem perbankan, makin sukar bagi bank sentral untuk melakukan suatu kebijakan moneter yang konsisten.

*Kedua*, penciptaan Kredit Bank Komersial

Deposito bank komersial merupakan bagian penting dari penawaran uang. Sebagai kemudahan untuk analisis, deposito ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, "deposito primer" yang menyediakan sistem perbankan dengan basis uang (uang kontan dalam bank + deposito di bank central). Kedua, "deposito derivatif" yang dalam sebuah sistem cadangan proporsional mewakili uang yang diciptakan oleh bank komersial dalam proses perluasan kredit dan merupakan sumber utama ekspansi moneter dalam perekonomian dengan kebiasaan perbankan yang sudah maju.

*Ketiga*, surplus neraca pembayaran

Hanya sebagian kecil negara-negara muslim menikmati surplus neraca pembayaran, sedangkan sebagian besar dari mereka mengalami defisit. Mereka yang mengalami surplus, surplus itu tidak terjadi dalam sektor swasta dan tidak menyebabkan suatu ekspansi otomatis dalam penawaran uang. Ia terjadi hanya karena pemerintah menguangkan surplus dengan membelanjakannya secara domestik. sedangkan defisit neraca pembayaran sektor swasta tidak menggantikan ini secara memadai.

Jika dalam suatu negara dengan suatu surplus, pengeluaran pemerintah diatur menurut kapasitas ekonomi untuk menghasilkan penawaran riil,



seharusnya tidak ada inflasi yang dihasilkan secara internal, sebagai akibat dari adanya surplus neraca pembayaran.

Di negara-negara yang mengalami defisit, sumber utama defisit berasal dari ekspansi moneter yang tidak sehat dibarengi dengan konsumsi mencolok dari sektor swasta dan pemerintah melalui defisit transaksi berjalan dan kebocoran modal "bawah tanah". Hal ini tidak dapat dihapuskan tanpa reformasi sosioekonomi pada tingkatan yang lebih dalam dan kebijakan fiskal maupun moneter sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Mengenai fiskal, menurut Chapra kebijakan fiskal telah menjadi perangkat penting bagi negara sejahtera. Kebijakan ini mencakup pengeluaran untuk kepentingan umum, pajak progresif dan pinjaman untuk merealisasikan tujuan yang dicita-citakan. Pengeluaran umum bukan hanya untuk fungsi tradisional sebagaimana diakui bahkan oleh negara *laissez-faire* (pertahanan, administrasi umum dan pelayanan ekonomi), tetapi juga untuk fungsi negara sejahtera dalam meningkatkan pertumbuhan, stabilitas ekonomi dan persamaan pendapatan yang lebih besar.

Dengan ekspansi tanggungjawab negara yang terus-menerus untuk menjalankan fungsi-fungsi ini, telah terwujud pertumbuhan eksponensial dalam pengeluaran umum dan perpajakan selama lima puluh tahun terakhir, terutama karena kenaikan yang tinggi untuk pertahanan dan pembayaran transfer. Yang terakhir sangat banyak manfaatnya, termasuk pemberian keamanan sosial (semisal ganti rugi pengangguran), pemberian bantuan sosial (santunan untuk manusia lanjut usia dan anak-anak), subsidi (dalam bentuk makanan dan keperluan umum), pelayanan umum (pendidikan, kesehatan,

perumahan dan transportasi umum), yang tidak terbatas untuk golongan miskin saja tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum.<sup>33</sup>

Antara tahun 1960 dan 1982 pengeluaran pemerintah secara rata-rata dalam persentase GDP naik dari titik 15 % ke 41,3 % di negara-negara OECD (*Organization of Economy Cooperation and Development*, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan). Setelah itu sedikit demi sedikit berkurang 40 % pada tahun 1988. Di setiap negara, ia melonjak setinggi 66 % dan 62 % di Swedia dan Belanda pada tahun 1982, kemudian menurun lagi sekitar 59 % dan 58 % pada tahun 1988. Rasio pengeluaran terendah adalah di Swiss, sebesar 30 %.

Rasio ini juga terus naik di Amerika Serikat, yang komitmennya kepada negara sejahtera tidak sama dengan Swedia, dari sekitar 10 % GDP tahun 1970 menjadi 37 % tahun 1986, kemudian berkurang sedikit menjadi 36,3 % pada 1988.<sup>19</sup> Pengeluaran meningkat tidak hanya selama masa resesi dan pengangguran, tetapi juga pada masa kemakmuran dan *full employment*, suatu posisi yang tidak dapat dibenarkan menurut teori Keynes. Pengeluaran pemerintah terus meningkat karena kapitalisme *laissez-faire* telah menjadi tidak stabil dan tidak adil sejak semula dan revolusi mempengaruhi meningkatnya harapan akan barang-barang dan jasa-jasa fisik, yang telah diwujudkan oleh budaya materialisme, tidak bisa dipenuhi tanpa adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.<sup>34</sup>

Bagaimanapun, meningkatnya pengeluaran telah disertai dengan dua perubahan besar dalam struktur pengeluaran pemerintah di negara-negara OECD. Salah satunya adalah pengeluaran yang tinggi dalam bidang pertahanan,

---

<sup>33</sup> Chapra, *Islam dan Tantangan ...*, h. 129

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 130.

pembayaran transfer dan penurunan pengeluaran investasi pemerintah lainnya adalah pengeluaran yang tidak fleksibel dalam seluruh pengeluaran.

Karena tingkat pertumbuhan di kebanyakan negara berada di bawah standar yang diharapkan untuk mengurangi besarnya jumlah pengangguran, penurunan pengeluaran benar-benar mempunyai akibat sosial dan politik yang serius dan sensitif karena pengeluaran pemerintah yang tidak terkontrol. Maka pemerintah berada di bawah tekanan untuk memotong pengeluaran. Namun, pemerintah bukannya mulai meletakkan prioritas sesuai dengan tujuan sosio-ekonomi yang disepakati, malah menempuh "strategi pemotongan-pemotongan kecil ke sana ke mari yang segera dikembalikan".<sup>35</sup>

Kecenderungan umum tampak mengarah pada upaya "memotong daging bukannya lemak". Biasanya calon utama untuk pemotongan adalah pengeluaran investasi pemerintah dan pengeluaran untuk kesejahteraan rakyat baik untuk golongan kaya maupun miskin. Karena pemotongan semacam ini tidak bisa berlangsung lama tanpa merugikan prospek pertumbuhan masa depan negara dan stabilitas sosial atau menurunkan dukungan politik untuk partai yang berkuasa, kemungkinan untuk rugi tetap besar. Ini merupakan salah satu alasan utama mengapa pemerintah tidak mampu memenuhi janjinya kepada para pemilih mengenai pemotongan jangka panjang secara terus-menerus dalam pengeluaran.

Meredanya ketegangan Timur-Barat telah memungkinkan pemerintah untuk menikmati suatu "keuntungan perdamaian" yang besar dalam bentuk defisit yang lebih rendah dan alokasi yang lebih tinggi untuk sejumlah sektor yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan efisiensi dari keadilan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 131.

ekonomi. Namun, perasaan umum tampaknya akan sesuai dengan apa yang pernah ditulis oleh *New York Times* dalam editorialnya, "Para pemimpin politik akan merasa enggan memotong pengeluaran Pentagon, sekalipun mereka mengakui bahwa pemotongan adalah sikap bijaksana, sehingga mereka merasa yakin bahwa masyarakat tidak akan menghadapi kehancuran ekonomi."

Hal ini menunjukkan bahwa tidak akan banyak peranan pengelola ekonomi dalam anggaran Pentagon yang besar untuk dapat mencegah pemotongan yang besar dalam anggaran itu, yang lebih berperan ialah tekanan kelompok politik. Besar kemungkinan untuk menangani bagian pengelolaan ekonomi dari anggaran dengan alokasi untuk peningkatan kesehatan, pendidikan, penelitian, infrastruktur, lingkungan dan pekerjaan. Tetapi sejumlah kecil perusahaan-perusahaan raksasa yang mempunyai pengaruh politik besar akan lebih menyukai pengelolaan ekonomi melalui pengeluaran militer yang lebih besar.<sup>36</sup>

Pemotongan subsidi pertanian, yang sangat menguntungkan para petani besar melalui program dukungan harga yang merugikan orang miskin melalui harga yang tinggi juga bisa bermanfaat. Subsidi bagaimanapun terus naik. Subsidi ini telah meningkat sebagai suatu persentase dari pendapatan pertanian untuk seluruh negara OECD. Antara tahun 1979 dan 1986, meningkat dari 14,7 % menjadi 35,4 % di Amerika Serikat, dari 44,3 % menjadi 49,3 % di Masyarakat Eropa, dan 64,3 % menjadi 75 % di Jepang. Biaya langsung bagi pembayar pajak juga merupakan suatu beban besar: sekitar \$ 40 milyar setahun di Amerika Serikat; begitu pula di Jepang; dan sekitar \$ 30 milyar di Masyarakat Eropa, meskipun sudah dilakukan reformasi pertanian. baru-baru ini.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 131.

Biaya tidak langsung dari harga makanan yang lebih tinggi dan produksi yang tidak efisien bahkan lebih tinggi. Estimasi terbaru OECD tentang jumlah biaya bagi pembayar pajak dan konsumen di negara-negara anggotanya adalah sebesar \$ 245 milyar pertahun. Financial Times dalam editorialnya menyesalkan bahwa jarang terjadi "banyak sekali pengeluaran yang dihaburkan untuk sesuatu yang tidak berarti". Karena para politikus di negara-negara industri maju menjadi tawanan lobi-lobi pertanian mereka, perhatian yang dirangsang oleh data-data ini tidak mempunyai efek yang dapat diperkirakan.<sup>37</sup>

#### 4. Merubah Sistem Perbankan

Menurut Chapra,

*The establishment of the Islamic money and banking system need not, however, wait until a morally-conscious ideal muslim society has been brought into existence*<sup>38</sup> (pembentukan keuangan dan sistem perbankan Islam tidak harus menanti sampai terwujudnya masyarakat muslim ideal yang berkesadaran moral.

Selanjutnya menurut Chapra:

*A number of steps need to be taken along with the socio-economic reform of the muslim society to enable the transformation of the conventional money and banking system to the Islamic one. Some of the important steps are*<sup>39</sup> (beberapa langkah/tahap harus diambil sejalan dengan pembaharuan dalam masyarakat muslim yang dapat membuatnya mampu untuk merubah sistem keuangan dan perbankan konvensional menjadi sistem yang Islami.

Menurut Chapra, umat Islam harus mengejar ketertinggalannya dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang perbankan. Menurut Chapra untuk bangkitnya kembali umat Islam harus dilakukan secara bertahap dan tidak perlu tergesa-gesa. Akan tetapi untuk membangun perbankan yang bercorak islami tidak harus menunggu sampai bangkitnya kembali umat Islam.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 132.

<sup>38</sup> Chapra, *Towards ...*, h. 228.

<sup>39</sup> *Ibid*

Bank yang bercorak islami sangat menguntungkan baik di dunia maupun di akhirat sebaliknya bila umat Islam mempertahankan bank yang bercorak konvensional maka umat Islam tidak hanya mendapat kerugian tapi juga akan menghancurkan perekonomian umat Islam yang terutama akan menjadi korban dari perekonomian yang bercorak konvensional adalah rakyat kecil. Untuk itu kesadaran para pemimpin umat Islam sangat dibutuhkan dalam mewujudkan perbankan yang Islami.

Menurut Chapra bank konvensional tidak dapat mensejahterakan umat manusia, sebaliknya bank Islam bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia di dunia dan keselamatan di akhirat. Bagaimanapun juga fakta membuktikan bahwa bank konvensional hanya menghidupkan golongan ekonomi kuat dan menyengsarakan kelompok golongan ekonomi kecil. Menurut Umer Chapra, bila umat Islam tidak menyadari dan tidak segera merubah sistem perbankannya maka berarti para pemimpin dan para ahli dalam bidang ekonomi dan perbankan akan mendapat kerugian, sebaliknya jika para pemimpin dan para ahli berusaha mewujudkan berdirinya bank Islam dengan penuh suka rela maka Allah akan memakmurkan negara tersebut.

Menurut Chapra untuk merubah sistem perbankan konvensional menuju perbankan Islam perlu dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Tahapan-tahapan tersebut dapat dilalui dengan baik adalah apabila dilakukan dengan tulus ikhlas. Tahapan-tahapan yang dimaksud sebagai berikut: <sup>40</sup>

Dalam konteksnya dengan tahapan merubah sistem perbankan konvensional menuju sistem perbankan yang islami maka Chapra memberi petunjuk bahwa menurutnya beberapa langkah (tahap) harus diambil sejalan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 204-205

dengan pembaharuan dalam masyarakat muslim yang dapat membuatnya mampu untuk merubah sistem keuangan dan perbankan konvensional menjadi sistem yang Islami. Tahap-tahap penting tersebut adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Bunga harus dinyatakan sebagai suatu yang ilegal dengan memungkinkan adanya masa toleransi yang menganggap bunga sebagai kejahatan, namun setelah masa toleransi habis maka bunga harus dihapuskan dari transaksi domestik. Amandemen (pasal-pasal dalam hukum yang memungkinkan adanya perubahan) harus dibuat pada hukum-hukum mengenai institusi-institusi keuangan dan perusahaan.

Dengan demikian diharapkan akan muncul kesadaran pada larangan-larangan akan bunga, dan akan lebih dapat memahami perbedaan kebutuhan dalam ekonomi Islam. Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan *mudharabah* dan *syirkah* sebagai bentuk organisasi bisnis harus segera diciptakan. Demikian pula harus ada perubahan peraturan mengenai *auditing* untuk mengurangi kesalahan manajemen dan berbuat adil pada para penanam modal.

- b. Persamaan/rasio pinjaman di masyarakat Islam harus ditingkatkan untuk merubah pinjaman alamiah dalam ekonomi. Semua bisnis, perusahaan-perusahaan, kemitraan dan pemilikan tunggal (*monopoli*) harus diarahkan dalam rangka membentuk suatu persamaan dalam perolehan proporsi keuangan guna mengurangi ketergantungan pada bantuan yang selama ini mereka peroleh, dan semua kebutuhan akan modal harus dibagi rata.

Jika hal ini memerlukan perubahan dari kemitraan yang besar menjadi perusahaan maka tindakan seperti di atas harus didorong dan diwujudkan.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h.205-208

Sementara itu, semua tujuan jangka panjang dalam bisnis pembiayaannya harus sama, dengan demikian akan memberi jalan bagi pembayaran secara *murabahah* dan pembayaran sewa.

- c. Perubahan dalam sistem pajak tidak diragukan lagi dapat memperlancar proses ini. Sistem pajak yang tidak rasional telah menyebabkan perolehan keuntungan secara haram yang digunakan bukan untuk hal-hal yang produktif melalui peningkatan persamaan dan pemilikan tetapi justru telah membuat larinya modal, dan konsumsi yang tidak berguna yang semua itu ditentang oleh Islam.
- d. Gerak ekonomi dalam skala besar untuk meningkatkan persamaan akan mendorong mobilisasi dana yang disediakan oleh para investor terutama investor *riba* yang tidak disukai, dan para investor *riba* tersebut akan menggunakan kesempatan untuk menyimpan uang mereka secara produktif. Hal ini merupakan akibat dari perluasan pemilikan bisnis di dalam masyarakat dan pengurangan konsentrasi kemakmuran.

Oleh karena itu kecenderungan di atas harus diantisipasi dengan langkah pengorganisasian kembali pasar modal sejalan dengan garis-garis yang tidak spekulatif dan Islami dan pengorganisasian nilai-nilai sesuai dengan faktor-faktor ekonomi dan bukan di bawah pengaruh kekuatan-kekuatan spekulatif yang tidak masuk akal.

- e. Seluruh sektor pemerintah yang ditujukan untuk komersial, maka untung-rugi yang harus ditanggung bersama harus dirubah, karena kerugian lebih banyak ditanggung oleh publik (pemerintah). Langkah ini untuk mengurangi peranan sektor publik atau pemerintah dalam menjual barang-barang digantikan oleh peranan swasta (*private sector*) termasuk institusi-institusi keuangan. Oleh



karena itu, pengorganisasian institusi ini harus dapat menampung orang-orang yang tidak mampu mengakses harga biasa. Hal ini memerlukan kebangkitan pengorganisasian institusi zakat.

- f. Bunga yang disponsori pemerintah harus dikurangi terutama dalam institusi-institusi kredit yang bergerak dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini tentu saja tidak berarti mendorong adanya pinjaman tanpa bunga sama sekali dengan tidak memperhitungkan untung-rugi.

Selama ini mekanisme yang berlangsung selalu memberi peluang dan fasilitas dana cuma-cuma terhadap mereka yang disukai oleh pemerintah sehingga menimbulkan konsentrasi kekayaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya institusi-institusi yang mengelola modal yang terbatas. Institusi-institusi ini merupakan yayasan sosial yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam mengenai kehidupan sosial.

- g. Semua institusi keuangan dengan orientasi pada bunga, baik itu bunga yang berasal dari luar maupun dalam negeri harus diganti dengan institusi bagi-hasil. Namun penghapusan semua Bank apalagi Bank asing sama saja dengan menghancurkan seluruh sistem. Cara yang terbaik yang harus dilakukan yaitu membuat institusi-institusi keuangan dapat melakukan penurunan bunga, dan liabilitasnya, serta dalam waktu yang bersamaan menaikkan sistem bagi-hasil serta liabilitasnya hingga terjadi perubahan total dalam beberapa tahun.

Pada tahap awal semua institusi-institusi keuangan tersebut diberi peluang untuk menggunakan teknik-teknik yang tersedia, namun harus ada jaminan bahwa metode-metode tersebut secara bertahap harus diganti dengan bentuk investasi *mudharabah*, *syirkah*, dan *saham*, serta bagi-hasil. Meskipun demikian tidak cukup hanya mengurangi bunga dari institusi-institusi

keuangan yang ada. Juga penting untuk merubah seluruh penampilan institusi-institusi keuangan tersebut menjadi institusi keuangan yang dapat menyumbang realisasi tujuan-tujuan sosial-ekonomi Islam, namun jangan selalu menekankan ketidak-seimbangan sosial-ekonomi yang ada.

- h. Pembentukan lembaga-lembaga bantuan keuangan harus ditujukan untuk memberi peluang sektor swasta dapat menerima dana, dan juga untuk mendukung terbentuknya Bank-Bank komersial. Hal ini akan meliputi berbagai bentuk lembaga-lembaga keuangan non-Bank seperti koperasi, perusahaan investasi, dan lembaga manajemen-investasi. Semua ini harus bekerja dalam kerangka yang Islami, peranan utama mereka ialah membantu para penabung untuk mencari keuntungan atas tabungan mereka dan membantu mereka untuk mendapatkan dana guna mengembangkan usahanya.

Oleh karena itu, institusi-institusi ini harus merupakan bentuk dari Bank Komersial dan pembaharuan dari bursa saham yang dapat menyediakan kebutuhan utama maupun kedua pasar modal demi terbentuknya ekonomi Islam. Selanjutnya, mungkin penting juga untuk mendirikan lembaga kredit khusus yang dikenal sebagai *the Investment Audit Corporation*, dan *the Deposit Insurance Corporation*.

Nampaknya tahap ini merupakan tahap yang penting untuk mendirikan sistem Bank Islam. Namun pencapaian target tersebut jangan dipaksakan. Proses perubahan tidak hanya memerlukan pengalaman dalam lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan-perusahaan bisnis, tetapi juga pengalaman dalam memecahkan persoalan yang secara teknis tidak nampak, serta masalah-masalah yang timbul dalam proses perubahan.

Masalah juga mungkin timbul dalam mendirikan the *Deposit Insurance Corporation* (Tabungan Asuransi) sebab masyarakat Islam kurang mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang tabungan semacam itu. Oleh karena itu, lebih baik berjalan dengan lambat tetapi pasti daripada tergesa-gesa namun gagal. Harus diingat bahwa apabila usaha ini berhasil maka akan dapat memperkuat prinsip-prinsip Islam, sebaliknya apabila gagal maka hanya akan melukai Islam.<sup>42</sup>

Lebih jauh Chapra mengungkapkan tentang hambatan yang akan muncul. Menurutnya bahwa hambatan utama dalam proses Islamisasi ialah beban bunga dalam negeri dan hutang luar negeri di sebagian besar masyarakat Islam. Penyelesaian masalah hutang yang besar dari sektor pemerintah pada masyarakat muslim akan memakan waktu paling panjang untuk mengatasinya, dan nampaknya sangat sulit diatasi tanpa adanya perubahan besar-besaran dari mekanisme pemerintahan, meminimalkan korupsi dan pengeluaran yang tidak berguna.

Langkah ini tidak mungkin dapat berhasil tanpa adanya komitmen dan pengorbanan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan kerjasama dengan rakyat. Rakyat mungkin tidak berkehendak untuk berkorban kecuali mereka telah sadar akan pentingnya perubahan, dan nilai-nilai telah diterapkan untuk merubah gaya hidup mereka menjadi gaya hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang berkuasa serta kaya harus dibuat supaya bersedia berkorban demi kebangkitan Islam, bersama-sama dengan golongan miskin, dan menengah yang biasanya lebih mempunyai kehendak akan perubahan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 208

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 209

## 5. Upaya Menekan Inflasi

Dalam hubungannya dengan upaya menekan inflasi, Chapra berpendapat yaitu dengan melakukan stabilitas harga. Hal ini sebagaimana diungkapkannya: “Tampak, oleh karena itu, bahwa indeksasi atas pendapatan (upah, gaji, pensiun dan pendapatan tetap lainnya dalam kategori ini) hanya layak dan harus dilakukan untuk mengurangi beban inflasi sesaat. bukan solusi yang permanen. Alternatif kebijaksanaan yang paling baik dan sesuai dengan norma keadilan sosio-ekonomi yang ditekankan oleh syari'ah adalah **stabilitas harga**, bukan indeksasi.

Jika benar-benar ingin menjalankan kewajiban sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, masyarakat Islam harus melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan ini. Tidaklah mungkin mendapatkan dukungan dari syari'ah untuk melakukan praktek indeksasi atas kekayaan finansial. Bahkan cara ini harus diabaikan. Dalam suatu perekonomian yang Islami, pemilik uang (termasuk deposito) harus mencari perlindungan terhadap berbagai bentuk inflasi melalui investasi.<sup>44</sup>

Selanjutnya Chapra mengungkapkan bahwa untuk tercapainya stabilitas harga, maka perlu strategi. Hal ini seperti dikatakannya:

Tidak ada satu tujuan yang dapat dicapai tanpa strategi yang memadai. Di sinilah Islam menawarkan keuntungan yang jelas. Bukan saja tujuan-tujuan di atas merupakan bagian integral dari ajaran Islam, tetapi juga karena sebagian besar isinya merupakan bagian dari syari'ah yang tidak boleh dilanggar.

---

<sup>44</sup> Chapra, *Al-Qur'an ...*, h. 12.

Menurut Chapra, strategi-strategi tersebut meliputi:

- a. Perbaiki moral (yang dikejar bukan hanya dimensi material tapi juga spiritual). Chapra mengatakan: elemen paling penting dari strategi Islam untuk merealisasikan tujuan-tujuan Islam adalah bersatunya semua hal yang dianggap sebagai aspek kehidupan biasa dengan spirit untuk meningkatkan moral manusia dan masyarakat tempat dia hidup. Tanpa peningkatan spirit semacam itu, tidak akan ada satu tujuan pun yang dapat direalisasikan dan kesejahteraan manusia yang sesungguhnya jadi sulit diwujudkan.

Hal ini membawa pada inti konsep kesejahteraan dalam Islam. Kesejahteraan manusia hanya dapat diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan material dan spiritual manusia dan tidak satupun yang dapat diabaikan. Jika Islam mendorong manusia agar menguasai alam dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan manusia, Islam juga mengingatkan agar mereka tidak hanya terpaku pada satu hal, menganggap pemenuhan materi sebagai tolok ukur tertinggi dari prestasi manusia karena hal ini justru menjuruskan mereka untuk melupakan nilai spiritual manusia itu sendiri. Islam menganggap kehidupan material dan spiritual sebagai satu kesatuan yang dapat saling menguatkan dan secara bersama-sama sebagai landasan bagi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia yang sesungguhnya.

Sungguh, tidak ada perbedaan aspek kehidupan material dan spiritual dalam Islam. Semua usaha manusia apakah itu ditujukan untuk tujuan ekonomi, sosial, pendidikan atau keilmuan sejauh masih sesuai dengan sistem Islam pada dasarnya bersifat spiritual. Bekerja keras untuk mendapatkan kesejahteraan material seseorang, keluarga dan masyarakat mempunyai nilai

spiritual sama dengan memanjatkan doa, terlepas apakah upaya material itu dibimbing oleh nilai-nilai spiritual atau tidak. Karena dilupakannya dimensi spiritual manusia dalam dunia kapitalisme dan sosialisme, mereka tidak bisa benar-benar memahami tujuan-tujuan mereka sendiri.<sup>45</sup>

b. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Chapra mengatakan:

Dengan demikian isi kedua yang penting dari strategi yang Islam adalah bahwa Islam telah memberikan satu cetak biru untuk pengorganisasian seluruh aspek kehidupan, ekonomi, sosial atau politik, yang memperkuat keberanian masyarakat untuk mengatakan yang benar dan mengaktualisasikan tujuan-tujuan yang sangat dekat dengan Islam. Misalnya, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh semua sistem ekonomi, tidak akan bisa dicapai tanpa: (a) keyakinan mengenai persaudaraan manusia yang hanya bermakna bagi mereka yang percaya akan Tuhan yang Esa yang menciptakan semua umat manusia, yang di hadapannya semua manusia sama dan akar; dimintai pertanggungjawaban;

(b) sistem sosio-ekonomi yang tidak menciptakan sikap sosial berdasarkan hukum survival Darwin, melainkan mereorganisasikan masyarakat atas landasan moral untuk mendorong interaksi sosio-ekonomi atas dasar keadilan dan kerjasama; (c) sistem sosial-politik yang mampu mencegah perlakuan tidak adil dan eksploitatif melalui berbagai cara, termasuk mencegah riba, dan memberikan dukungan material bagi yang lemah, masyarakat dan negara. Dengan berkembangnya diskusi dalam buku

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 16.

ini, semakin jelas kiranya bagaimana Islam meyakinkan realisasi tujuan-tujuannya.<sup>46</sup>

c. Penghapusan riba. Chapra mengatakan:

Di antara elemen utama dari strategi bagi pembaharuan sistem keuangan dan perbankan (misalnya, penghapusan riba dan berbagi untung dan rugi) telah dituturkan oleh Al Qur'an dan Sunnah. Elemen-elemen lain, tentu, harus dirancang oleh masyarakat Islam tergantung dari kondisi dan posisi relatif mereka dalam rangka mengaktualisasikan tujuan. Bagian-bagian strategi yang disarankan oleh Al Qur'an dan Sunnah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Meskipun demikian, pengujian atas elemen-elemen lain akan berupa dukungan yang mereka berikan terhadap keseluruhan strategi syari'ah dan sumbangan yang mereka berikan untuk merealisasikan tujuan.

Semakin kuat dukungan yang diberikan dan semakin besar sumbangan yang diberikan untuk mencapai tujuan akhir, semakin dikehendaki pula elemen-elemen strategi yang diberikan oleh manusia dengan catatan bahwa hal itu semua tidak bertentangan dengan syari'ah. Elemen-elemen yang terakhir ini, sudah barang tentu, tidak dapat sekali jadi, melainkan perlu diperbaiki dan disempurnakan secara berkelanjutan melalui suatu proses evolusi.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 17.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 20.

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT M. UMER CHAPRA TENTANG**

**UPAYA MENEKAN INFLASI**

Seperti telah dikemukakan dalam bab ketiga skripsi ini tentang upaya menekan inflasi perspektif M. Umer Chapra, maka dalam bab keempat hendak dikemukakan inti atau substansi penting dari pendapatnya. Sebagaimana diketahui, para pemerhati ekonomi Islam dan konvensional banyak yang menyetujui, bahwa kebijakan moneter dan fiskal merupakan bagian dalam upaya menekan inflasi. Demikian pula Chapra mengakui kebijakan fiskal dan moneter sebagai bagian menekan inflasi, namun Chapra menambahkan bahwa untuk menekan inflasi harus ada stabilitas harga, dan stabilitas harga, ada strateginya. Hal ini sebagaimana dikemukakan Chapra bahwa alternatif kebijaksanaan yang paling baik dan sesuai dengan norma keadilan sosio-ekonomi yang ditekankan oleh syari'ah adalah stabilitas harga.<sup>1</sup>

Menurut Chapra, strategi untuk menekan inflasi yaitu:

*Pertama*, perbaikan moral (yang dikejar bukan hanya dimensi material tapi juga spiritual). *Kedua*, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. *Ketiga*, penghapusan riba.

1. Perbaikan moral (yang dikejar bukan hanya dimensi material tapi juga spiritual).

Chapra mengatakan:

*“The most important element of the Islamic strategy for realising the Islamic goals is the integration of all supposedly mundane aspects of life*

---

<sup>1</sup> M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. 12.



*with the spiritual to bring about a moral uplift of the human being and the society in which he lives. Without such a spiritual uplift, none of the goals can be realised and true human welfare would be difficult to attain”.*<sup>2</sup>

“Elemen paling penting dari strategi Islam untuk merealisasikan tujuan-tujuan Islam adalah bersatunya semua hal yang dianggap sebagai aspek kehidupan biasa dengan spirit untuk meningkatkan moral manusia dan masyarakat tempat dia hidup. Tanpa peningkatan spirit semacam itu, tidak akan ada satu tujuan pun yang dapat direalisasikan dan kesejahteraan manusia yang sesungguhnya jadi sulit diwujudkan”.<sup>3</sup>

Jadi dalam perspektif Chapra bahwa elemen paling penting dari strategi Islam untuk merealisasikan tujuan-tujuan Islam adalah bersatunya semua hal yang dianggap sebagai aspek kehidupan biasa dengan spirit untuk meningkatkan **moral** manusia dan masyarakat tempat dia hidup. Hal ini membawa pada inti konsep kesejahteraan dalam Islam. Kesejahteraan manusia hanya dapat diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan material dan spiritual manusia”.

Masalah pentingnya perbaikan moral sebagaimana yang diinginkan Chapra, tampak sejalan dengan pendapat Taqyuddin An-Nabhani. Menurut Taqyuddin An-Nabhani apabila dipaparkan sistem ekonomi dalam pandangan ideologi Kapitalis, maka ditemukan bahwa ekonomi dalam pandangan mereka adalah apa yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan (*needs*) manusia beserta alat-alat (*goods*) pemuasnya. Dimana ia sesungguhnya hanya membahas masalah yang menyangkut aspek-aspek yang bersifat materi dan kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Menurut Taqyuddin An-Nabhani sistem itu dibangun dengan kerangka dasar yaitu *pertama*, kelangkaan atau keterbatasan barang-barang dan jasa-jasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Dimana barang-barang dan jasa-jasa itu tidak mampu atau memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan-

---

<sup>2</sup> M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation, 1985, h. 45.

<sup>3</sup> M. Umer Chapra, *Al-Qur'an ...*, h. 16.

<sup>4</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, h. 5.

kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan terus-menerus bertambah kuantitasnya. Inilah masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, menurut mereka. *Kedua* adalah nilai (*value*) suatu barang yang dihasilkan itulah yang menjadi dasar penelitian ekonomi, bahkan yang paling sering dikaji. *Ketiga* adalah harga (*price*) serta peranan yang dimainkannya dalam produksi, konsumsi dan distribusi. Di mana harga merupakan alat pengendali dalam sistem ekonomi Kapitalis.<sup>5</sup>

Mengenai kelangkaan dan keterbatasan barang-barang dan jasa-jasa secara relatif hal itu memang betul ada pada karakteristik barang-barang dan jasa-jasa itu sendiri sebagai alat pemuas kebutuhan-kebutuhan manusia. Mereka mengatakan, bahwa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan karena itu, maka harus ada alat-alat pemuasnya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan itu sebenarnya hanya bersifat materi semata. Karena bisa jadi kebutuhan-kebutuhan itu berupa sesuatu yang bisa dirasakan dan diindera manusia, seperti kebutuhan manusia akan makanan dan pakaian.

Juga bisa jadi kebutuhan-kebutuhan yang hanya bisa dirasakan, namun tidak dapat diindera oleh mereka, seperti kebutuhan manusia akan jasa layanan dokter dan guru. Sementara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *ma'nawi* (non fisik) seperti rasa bangga dan, atau kebutuhan spiritual seperti penyucian (penghormatan yang tertinggi), semua itu tidak pernah dikenal keberadaannya menurut sistem ekonomi mereka, bahkan hal itu tidak pernah mereka beri tempat, dan tidak pernah diperhatikan ketika membahas kajian ekonomi tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

Pendapat Chapra dan Taqyuddin An-Nabhani di atas mengisyaratkan bahwa sistem ekonomi Islam sangat memperhatikan moral. Menurut Hamzah Ya'qub yang dimaksud dengan moral ialah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Jadi sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima yang meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu.<sup>7</sup> Sejalan dengan itu Abuddin Nata merumuskan moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk.<sup>8</sup>

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada moral, dan akidah Islam berdasarkan Al-Qur'an al Karim dan As-Sunah Nabawiyah.<sup>9</sup>

Kembali pada pendapat Chapra, menurutnya kesejahteraan manusia hanya dapat diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan material dan spiritual manusia.<sup>10</sup> Pendapat Chapra ini sesuai dengan pendapat MA. Mannan yang berpendapat bahwa prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas

---

<sup>7</sup> Lihat Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pembinaan Ahlaq al-Karimah (Suatu Pengantar)*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005, h. 14

<sup>8</sup> Lihat Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h. 90.

<sup>9</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 3

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 16.

distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.<sup>11</sup>

Yang dimaksud nilai material adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia. Contoh, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal atau lebih dikenal sandang, pangan, papan. Yang dimaksud nilai spiritual adalah nilai yang berguna bagi rohani manusia. Nilai spiritual dibagi lagi menjadi nilai religi (agama), nilai estetika (keindahan, seni), nilai etika (moral) dan nilai logika (kebenaran).

Dengan demikian Chapra dan Mannan menghendaki kebijakan fiskal dalam rangka menekan inflasi tidak hanya meletakkan orientasi material, akan tetapi perlu meletakkan perspektif nilai-nilai spiritual. Dalam pemikiran Chapra dan Mannan, selama ini ekonomi konvensional dalam menekan inflasi melalui kebijakan fiskal hanya mengejar yang bersifat material, kebijakan hanya diarahkan untuk mensejahterakan kebutuhan material seperti sandang, pangan, dan papan. Kebijakan material ini hanya dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tertier, akan tetapi bersamaan dengan itu dimensi spiritual tertinggal jauh. Hal itu dibuktikan dengan dekadensi moral para pejabat, meningkatnya korupsi, kebocoran APBN, dunia ekonomi yang saling menjatuhkan, kapitalisme yang makin kuat, kemiskinan yang tak teratasi.

Masyarakat dalam menjalankan roda ekonomi sudah meninggalkan aspek tolong menolong, ketulusan dan masalah akhirat sudah tidak lagi menjadi bahan pertimbangan. Jadi tertinggalnya aspek spiritual mengakibatkan kebijakan fiskal menjadi tidak menyentuh masalah batiniah manusia sehingga kebijakan fiskal dalam menekan inflasi menjadi kebijakan yang kering. Hal itu dibuktikan

---

<sup>11</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997, h. 230.

dengan belum dimasukkannya masalah zakat, infak, shadaqah, wakaf sebagai bagian dari pendapatan belanja negara.

Tidak seperti kebijakan fiskal konvensional, di mana suatu pemerintahan dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui insentif dalam tarif pajak maupun besarnya *tax base* (dasar pajak) dari suatu kegiatan perekonomian, maka dalam sistem zakat, segala ketentuan tentang besarnya tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Oleh karena itu, kebijakan zakat sangat berbeda dengan kebijakan perpajakan.

Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan deficit Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang *deficit* (*mustahik*) menjadi surplus (*muzaki*). Pengumpulan dan penyaluran, dan potensi zakat (termasuk infak dan sedekah) sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, akhir-akhir ini sudah menjadi primadona untuk disoroti dalam kajian multi dimensi dalam khasanah literatur ekonomi Islam. Memang kenyataannya, zakat sebagai sebuah teori sudah banyak dieksplorasi oleh para ahli intelektual Muslim yang concern kepada pembangunan dan keuangan publik.

Mencermati uraian di atas, dan kembali pada inti pendapat Chapra bahwa Chapra menghendaki kebijakan fiskal sebagai upaya menekan inflasi atau stabilitas harga berorientasi material dan spiritual secara seimbang dan utuh. Chapra juga menyarankan agar zakat dan wakaf diperhitungkan sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Bahkan Chapra meniscayakan bahwa zakat juga mampu sebagai bagian menciptakan stabilitas dalam rangka menekan inflasi.

Pendapat Chapra jika dihubungkan dengan pendapat tokoh lain memiliki kesamaan walaupun berbeda dalam aspek skala prioritas. Misalnya tokoh Islam Yusuf Qardhawi yang terkenal dengan kitabnya *Fiqh az-Zakat* terkait dengan kebijakan fiskal menegaskan dalam bukunya: *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*

“Ada berbagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan yaitu melalui bekerja, jaminan sanak famili yang berkelapangan kepada anggota keluarga yang lain, zakat, baitul mal dengan segala sumbernya, berbagai kewajiban di luar zakat, sedekah sukarela dan kemurahan hati individu”.<sup>12</sup>

Tokoh lain seperti Ziauddin Ahmad, et al., dalam papernya menawarkan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal, kumpulan paper dari Munawar Iqbal yang dipresentasikan pada *International Conference on Islamic Economics* kedua yang diselenggarakan di Islamabad pada bulan Maret 1983, banyak mengkaji permasalahan deskripsi dan empirisasi ruang lingkup zakat dalam sebuah perekonomian yang menganut prinsip-prinsip etika Islami. Ziauddin Ahmad menghadirkan zakat sebagai instrumen sekuritas sosial yang merupakan bagian dari integrasi sistem Islami untuk pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan.

Sadeq menetengahkan ulasan dalam dimensi ekonomi, hukum, administrasi pada instrumen zakat. Shirazi memaparkan analisis insentif ekonomi pada kontribusi sistem zakat dalam program pengentasan kemiskinan di Pakistan. Chapra menawarkan banyak hal berkaitan dengan sistem zakat yang dapat dikontribusikan pada pengembangan sistem ekonomi Islam. Nejatullah

---

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press. 1995, h. 24.

Siddiqi menawarkan sejumlah aturan penting dalam konteks kewajiban pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur *Islamic economy*.<sup>13</sup>

Monzer Kahf mengutarakan pendapatnya: zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam. Salah satu kejahatan terbesar dalam sistem kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi yang dikuasai oleh segelintir manusia yang beruntung, hingga mengabaikan orang yang kurang beruntung yang sangat banyak jumlahnya. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam hal pendapatan yang ada dan akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan industri dan perdagangan dalam negeri. Karena suatu tatanan ekonomi yang didominasi monopoli, selalu merintangi pemanfaatan sumber daya ekonomi suatu negara dengan sepenuhnya.<sup>14</sup>

Menurut Chapra, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim.

Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah. Tidaklah realistis mengharapkan pemerintah untuk memikul seluruh beban kesejahteraan ini. Jika hasil zakat ini tidak mencukupi, fuqaha berpendapat

---

<sup>13</sup> Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006, h. 208.

<sup>14</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h. 174. Lihat juga Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1978, h. 135-143.

bahwa masyarakat Muslim harus memikul beban ini dan berusaha menemukan cara-cara dan alat-alat lain untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut.<sup>15</sup>

Menurut Chapra zakat bukan merupakan substitusi dari berbagai model pembiayaan mandiri yang dibuat masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan asuransi sosial bagi pengangguran, kecelakaan, usia lanjut, dan kecacatan melalui pengurangan dari gaji pegawai dan dari kontribusi pemberian kerja. Zakat juga tidak menggantikan komponen pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan dan untuk bantuan di saat terjadi bencana yang telah ditetapkan dalam anggaran.<sup>16</sup>

Lebih lanjut menurut Chapra zakat merupakan penopang dan tambahan meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengurangan kemiskinan. Demikian pula zakat tidak menghalangi negara untuk mengadopsi ukuran-ukuran fiskal dan skema-skema redistribusi pendapatan serta perluasan lapangan pekerjaan dan peluang penciptaan lapangan kerja sendiri melalui bantuan modal ringan dari dana zakat itu sendiri.<sup>17</sup>

Menurut Mubariq zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari ke hari. Meskipun mungkin mampu membantu fakir-miskin memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti ini cenderung mengabadikan si penerima dalam situasi kemiskinannya. Pemberian "ikan" yang terus menerus tidak mendorong orang menjadi "tukang pancing" terutama jika zakat dibagikan berdasarkan *flat rate* (tarif pukol rata).

---

<sup>15</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gip dan Tazkia, 2002, h. 317. Lihat Eko Suprayitno, *Ekonomi...*, h. 175.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 175.

<sup>17</sup> *Ibid*



Karena itu, "reorientasi" prioritas pemanfaatan zakat perlu dilakukan ke arah manfaat jangka panjangnya. Pertama, zakat harus dibagikan sebagai "pajak pendapatan negatif" untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul (setidaknya 50%) harus digunakan untuk membiayai kegiatan memberi "pancing" (kegiatan produktif) kepada kelompok masyarakat fakir-miskin.<sup>18</sup>

Lebih jauh Mubariq mengatakan bahwa tujuan utama "kegiatan memberi pancing" ialah meningkatkan kemampuan fakir miskin untuk menciptakan pendapatan dan mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan. Untuk tujuan ini zakat dapat digunakan untuk membiayai, antara lain, berbagai kegiatan latihan ketrampilan produktif, pemberian bantuan modal kerja atau bantuan modal pemulai (*start-up capital*). Daripada memberi bantuan konsumtif kepada lima keluarga untuk satu bulan, misalnya, lebih baik dana itu digabung dan digunakan untuk suatu usaha produktif bagi kelima kepala keluarga tersebut.<sup>19</sup>

## 2. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.

Chapra mengatakan:

*"Hence, the second important ingredient of the Islamic strategy is that it has provided a blueprint for the reorganisation of all aspects of life, whether economic, social or political, to enable them to strengthen the moral fibre of society and to actualise the goals so dear to Islam. For example, equitable distribution of income and wealth, the claimed objective of all economic systems, cannot be realized without: (a) a belief in the brotherhood of mankind, which can meaningfully spring only from a belief in the One God Who has created all human beings and before Whom everyone is equal and fully accountable; (b) a socio-economic system which does not create the social-Darwinist attitude of survival of the fittest, but reorganises society on moral foundations to foster socio-economic interaction based on justice and cooperation; (c) a socio-political system which prevents injustice and exploitation through various ways, including the prohibition of riba, and makes the material support of the weak and the*

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 175.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 176.

*down-trodden amoral obligation of the individuals, the society and the state. With the progress of the discussion in this book, it will gradually become clearer how Islam can ensure the realisation of its goals*".<sup>20</sup>

"Dengan demikian si kedua yang penting dari strategi yang Islam adalah bahwa Islam telah memberikan satu cetak biru untuk pengorganisasian seluruh aspek kehidupan, ekonomi, sosial atau politik, yang memperkuat keberanian masyarakat untuk mengatakan yang benar dan mengaktualisasikan tujuan-tujuan yang sangat dekat dengan Islam. Misalnya, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh semua sistem ekonomi, tidak akan bisa dicapai tanpa: (a) keyakinan mengenai persaudaraan manusia yang hanya bermakna bagi mereka yang percaya akan Tuhan yang Esa yang menciptakan semua umat manusia, yang di hadapan-Nya semua manusia sama dan akar; dimintai pertanggungjawaban; (b) sistem sosio-ekonomi yang tidak menciptakan sikap sosial berdasarkan hukum survival Darwin, melainkan mereorganisasikan masyarakat atas landasan moral untuk mendorong interaksi sosio-ekonomi atas dasar keadilan dan kerjasama; (c) sistem sosial-politik yang mampu mencegah perlakuan tidak adil dan eksploitatif melalui berbagai cara, termasuk mencegah riba, dan memberikan dukungan material bagi yang lemah, masyarakat dan negara. Dengan berkembangnya diskusi dalam buku ini, semakin jelas kiranya bagaimana Islam meyakinkan realisasi tujuan-tujuannya".<sup>21</sup>

Menurut Heri Sudarsono, distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Di lain pihak, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam di tengah-tengah umat manusia lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.

Hal itu memang tidak bisa disangkal beberapa aspek normatif yang berkaitan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW merupakan bagian penting dari misi dakwahnya. Sebenarnya konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, di mana ukuran berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi bagaimana bisa terdistribusi penggunaan potensi

---

<sup>20</sup> M. Umer Chapra, *Towards ...*, h. 47

<sup>21</sup> M. Umer Chapra, *Al-Qur'an ...*, h. 17.

kemanusiaannya, yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Distribusi harta tidak akan mempunyai dampak yang signifikan (berarti) kalau tidak ada kesadaran antara sesama manusia akan kesamaan hak hidup.<sup>22</sup>

Oleh karena itu dalam distribusi pendapatan berhubungan dengan beberapa masalah:

- a. Bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan.
- b. Apakah distribusi pendapatan yang dilakukan harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama.
- c. Siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan ini di masyarakat.

Untuk menjawab masalah ini, Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infaq dan shadaqoh. Kemudian Baitul Mal membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberi bantuan langsung ataupun tidak langsung. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar *mashlahah* di mana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu saling bisa menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing. Semua keadaan di atas akan terealisasi bila masing-masing individu sadar terhadap eksistensinya di hadapan Allah.

Pendapat Chapra sejalan pula dengan pendapat Imamudin Yuliadi. Menurutnya, Islam juga telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan. Instrumen distribusi kekayaan dalam Islam melalui beberapa aturan yaitu:

---

<sup>22</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2004, h. 234

- a. Wajibnya *muzakki* (orang yang berzakat) membayar zakatnya dan diberikan kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) khususnya kalangan fakir miskin.
2. Hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum. Negara berhak mengelola secara optimal dan efisien serta mendistribusikannya kepada masyarakat secara adil dan proporsional.
3. Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal bagi yang memerlukannya.
4. Pemberian harta waris kepada ahli warisnya.
5. Larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah dikeluarkan zakatnya.<sup>23</sup>

Pemberlakuan aturan dalam pendistribusian kekayaan secara adil akan menjaga kemungkinan terjadinya ketimpangan pendapatan di antara anggota masyarakat. Di satu sisi ada kesempatan dan peluang bagi individu yang kreatif dan punya potensi untuk dapat memiliki kekayaan dalam jumlah yang banyak tanpa harus melakukan praktek ekonomi yang tidak benar seperti monopoli, KKN dsb dan di sisi lain, negara akan menjaga agar jangan sampai ada anggota masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

### 3. Penghapusan riba.

Chapra mengatakan:

*“Some major elements of the strategy for the reform of the money and banking system (for example, abolition of riba and profit-and-loss sharing) have been prescribed by the Quran and the Sunnah. Other elements have to be designed by the Muslim countries depending on their circumstances and their relative position on the path of goal actualisation. The parts of the strategy prescribed by the Qur'an and the Sunnah are indispensable and beyond dispute. The crucial test for other elements of the strategy will, however, be the support they provide to the overall strategy of the Shari'ah and the contribution they make to the realisation of the goals. The stronger the support provided and the greater the contribution made toward the*

---

<sup>23</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001, h. 115.

*ultimate objective, the more desirable would be the man-made elements of the strategy provided that they are not in conflict with the Shari'ah. Such man-made elements of the total strategy cannot be a one-time affair. They would need to be continually improved and perfected through a process of evolution".*<sup>24</sup>

“Di antara elemen utama dari strategi bagi pembaharuan sistem keuangan dan perbankan (misalnya, penghapusan riba dan berbagi untung dan rugi) telah dituturkan oleh Al Qur'an dan Sunnah. Elemen-elemen lain, tentu, harus dirancang oleh masyarakat Islam tergantung dari kondisi dan posisi relatif mereka dalam rangka mengaktualisasikan tujuan. Bagian-bagian strategi yang disarankan oleh Al Qur'an dan Sunnah tidak dapat ditawarkan lagi. Meskipun demikian, pengujian atas elemen-elemen lain akan berupa dukungan yang mereka berikan terhadap keseluruhan strategi syari'ah dan sumbangan yang mereka berikan untuk merealisasikan tujuan. Semakin kuat dukungan yang diberikan dan semakin besar sumbangan yang diberikan untuk mencapai tujuan akhir, semakin dikehendaki pula elemen-elemen strategi yang diberikan oleh manusia dengan catatan bahwa hal itu semua tidak bertentangan dengan syari'ah. Elemen-elemen yang terakhir ini, sudah barang tentu, tidak dapat sekali jadi, melainkan perlu diperbaiki dan disempurnakan secara berkelanjutan melalui suatu proses evolusi”.<sup>25</sup>

Dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm* dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba dan tidak kurang disebut sebanyak dua puluh kali.<sup>26</sup>

- a. Abu Bakar Jabir al-Jazairi dengan singkat menyatakan bahwa riba adalah tambahan uang pada sesuatu yang khusus.<sup>27</sup>
- b. Menurut Abdurrahmân al-Jaziri Kitab *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap tambahan tersebut.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> M. Umer Chapra, *Towards ...*, h. 49.

<sup>25</sup> M. Umer Chapra, *Al-Qur'an ...*, h. 20.

<sup>26</sup> Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, h. 299 – 300. Lihat juga Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, “Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 33.

<sup>27</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, h. 299.

<sup>28</sup> Abdurrahmân al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, h. 196.

- c. Menurut Syafi'i Antonio, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.<sup>29</sup>
- d. Menurut Maulana Muhammad Ali, riba adalah suatu tambahan di atas pokok yang dipinjamkan.<sup>30</sup>
- e. Menurut Fuad Moh. Fachruddin, riba adalah satu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam meminjam.<sup>31</sup>
- f. Menurut Ahmad Sukarja, riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu di antara dua pihak yang melakukan muamalah utang piutang atau tukar menukar barang.<sup>32</sup>
- g. Menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.<sup>33</sup>
- h. Menurut Majfuk Zuhdi sebagaimana mengutip pendapat Al-Jurjani merumuskan riba sebagai kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).<sup>34</sup>

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pernyataan al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279.

---

<sup>29</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, h. 59.

<sup>30</sup> Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, "Islamologi (Dinul Islâm)", Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977, h. 484.

<sup>31</sup> Fuad Moh. Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, h. 62.

<sup>32</sup> Ahmad Sukarja, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (editor), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995, h. 34.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, h. 147.

<sup>34</sup> *Ibid*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275).

Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan Setan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah: 278).

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

Artinya: Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada di antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada yang teraniaya. (Q.S. al-Baqarah: 279)

Mengapa praktek riba dikecam dengan keras dan kemudian diharamkan?

Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi riba dan

menumbuhkan tradisi shadaqah, karena riba itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Sedang *illat* pengharaman riba agaknya dinyatakan dalam ayat 279, *la tazlimuna wala tuzlamun*. Maksudnya, dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat *zulm* (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorangpun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasanya *illat* pengharaman dalam surat al-Baqarah adalah *zulm* (eksploitasi; menindas, memeras dan menganiaya).

Keempat ayat dalam surat al-Baqarah tentang kecaman dan pengharaman riba ini didahului 14 ayat (2:261 sampai dengan 274) tentang seruan *infaq fi sabilillah*, termasuk seruan *shadaqah* dan kewajiban berzakat. Allah akan mengganti dan melipatgandakan balasan shadaqah dengan 700 kali lipat bahkan lebih banyak lagi, bahwa sesungguhnya syetan selalu menakuti manusia dengan kekhawatiran jatuh miskin sehingga manusia cenderung berbuat keji (dengan bersikap kikir, enggan bershadaqah dan melakukan riba).

Selain yang disebutkan di atas, rangkaian empat ayat tentang kecaman dan pengharaman riba diakhiri dengan ayat 280. Ayat ini berisi seruan moral agar berbuat kebajikan kepada orang yang dalam kesulitan membayar hutang dengan menunda tempo pembayaran atau bahkan dengan membebaskannya dari kewajiban melunasi hutang.

Pernyataan al-Qur'an tentang keharaman riba juga terdapat di dalam surat Ali Imran (3:130). Larangan memakan harta riba dalam surat Ali Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan 136. Di sana antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek riba menjadi tolok ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu dinyatakan bahwa



menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian pertanda orang yang bertakwa.

Pernyataan Hadis Nabi mengenai keharaman riba antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم) <sup>35</sup>

Artinya: Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husayim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim).

Secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>36</sup> Menurut Ahmad Rofiq, "riba merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging".<sup>37</sup>

Sebab itu, istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam, sehingga terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang muslim Amerika, Cyril Glasse yang dikutip Dawam Raharjo, tidak diberlakukan di negeri Islam modern mana pun. Sementara itu, tidak banyak yang tahu bahwa di dunia Kristen selama satu millennium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan teolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang. Tetapi

<sup>35</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, Mesir : Tijariah Kubra, tth, h. 50.

<sup>36</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 37.

<sup>37</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2004, h. 190.

memang praktek itu sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembunga uang itu.<sup>38</sup>

Persoalan tentang riba yang dilarang bukan saja dibicarakan dalam agama Islam tetapi juga dalam agama-agama samawi lainnya. Bahkan sejak zaman kejayaan Athene, Solon telah membuat undang-undang yang melarang riba. Ahli-ahli filsafat seperti Plato dan Aristoteles pun tidak membenarkan riba. Mereka menganggap bunga uang bukan keuntungan yang wajar karena pemilik uang tersebut tidak turut serta menanggung resiko.<sup>39</sup>

Menurut Mahmud Yunus, orang-orang yang mengambil riba samalah pendiriannya dan tingkah lakunya dengan orang yang dibinasakan (diharu) setan, karena ia sangat tamak, kejam dan tidak menaruh rasa iba kepada fakir miskin.<sup>40</sup> Karena itu menurut Hamka, riba harus dikikis habis sebab menjadi pangkal dari kejahatan, dan hanya mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain.<sup>41</sup>

Islam beserta semua syari'at samawi melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini hanya diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba.

---

<sup>38</sup>M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 2002, h. 594.

<sup>39</sup>M. Rusli Karim (Editor), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992, h. 120

<sup>40</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1978, h. 64.

<sup>41</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2003, h. 97.

Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktek-praktek riba. Bahkan praktek-praktek riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong menolong dan bergotong royong di antara sesama manusia.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam Mabadi Uhu Wahdafuhu*, Terj Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, "Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya", Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980, h. 87 – 88.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mempelajari uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi yaitu harus ada stabilitas harga, dan strategi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Chapra: “Alternatif kebijaksanaan yang paling baik dan sesuai dengan norma keadilan sosio-ekonomi yang ditekankan oleh syari'ah adalah stabilitas harga. Menurut Chapra, strategi untuk menekan inflasi yaitu *pertama*, perbaikan moral (yang dikejar bukan hanya dimensi material tapi juga spiritual). *Kedua*, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. *Ketiga*, penghapusan riba. Menurut Chapra, inflasi mempunyai pengertian bahwa uang tidak dapat digunakan sebagai nilai tukar yang adil dan jujur. Ini menjadikan uang sebagai alat pembayaran yang tidak adil bagi penangguhan pembayaran dan penyimpanan nilai yang tidak dapat dipercaya. Uang dapat membuat sebagian orang menjadi tidak jujur kepada orang lain, bahkan meskipun tanpa disadari, dengan diam-diam merusak daya beli aset moneter.

#### **B. Saran-saran**

Perguruan tinggi hendaknya membuka akses pada peneliti lainnya untuk meneliti lebih dalam lagi tentang upaya menekan inflasi perspektif ekonomi Islam.

#### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup

kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Namun demikian semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi pembaca budiman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bâqy, Muhammad Fuâd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi Fi al Islam Mabadi Uhu Wahdafuhu*, Terj Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, "Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya", Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980.
- Ali, Maulana Muhammad. *The Religion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, "Islamologi (Dînul Islâm)", Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977.
- al-Jaziri, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972
- Al-Jaziri, Abu Bakr Jabir, *Minhajul Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.h.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Beirut: Muassasah Risalah, 1991.
- , *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- Abdul Bâqy, Muhammad Fuâd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, Mesir : Tijariah Kubra, tth.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- As-Sayuti, Jalaluddin, *Tarikh al-Khulafa*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr.
- Boediono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- , *Teori Moneter*, Yogyakarta: BPFE, 1983
- Bogdan, Robert, and Steven J. Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York, 1975.

- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gip dan Tazkia, 2002.
- , *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- , *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- , *Towards a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation, 1985.
- Collins, *Kamus Lengkap Ekonomi*, terj. Tumpul Rumapea dan Posman Haloho, Jakarta: Airlangga, 1994.
- Donohue, John J. dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, Terj. Machnun Husein, Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Fachruddin, Fuad Moh., *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Haekal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah, cet, ke-29, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2003.
- Huda, Nurul, et al., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007.
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kara, Muslimin H., *Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Karim Adiwarman A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- , *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- , *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought III T, tth.

- , *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002.
- , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ya'qub, Hamzah, *Etika Islam Pembinaan Ahlaq al-Karimah (Suatu Pengantar)*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary, (editor), *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.
- Yunus, Mahmud, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1978.
- , *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- , *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought III T, tth.
- , *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002.
- , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Karim, M. Rusli (Editor), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992.
- Kholiludin, Tedi (Ed.), *Runtuhnya Negara Tuhan Membongkar Otoritarianisme dalam Wacana Politik Islam*, Semarang: INSEDE, 2005
- Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 14, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1970
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- , *Islamic Economics,, Theori and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008
- Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nasution, Mustafa Edwin, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006.
- Nata, Abuddin, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Nazir., Moh., *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Novirin, *Ekonomi Moneter*, Buku 1, Yogyakarta: BPFE, 1993.



- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Raharjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2004.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Syalabi, A., *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid I, Jakarta: AL-Husna Zikra, 1997. cetakan IX.
- Taufikun, Isnu, "Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra tentang Sumber-Sumber Utama Ekspansi Moneter", Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2005.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Reformulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Waluyo, Slamet, "Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam". Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009.
- Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Bandung: Alumni, 2005.
- Wirayaningsih (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001